

RUSDI SUFI

**GERAKAN  
NASIONALISME  
DI ACEH  
(1900-1942)**

KAAN

2 2

Jarah

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
BANDA ACEH

**GERAKAN NASIONALISME DI ACEH  
(1900 - 1942)**

Oleh :  
**Rusdi Sufi**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
BANDA ACEH  
1998**

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.

8785  
17-6-58

# **GERAKAN NASIONALISME DI ACEH (1900 - 1942)**

Oleh :  
**Rusdi Sufi**

Gambar Sampul : **Muhammad Umar (Emtas)**

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang

ISBN 979-95312-4-1

757.002.3  
Sufi  
J. C. S.

Penerbit : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh  
1998

**SAMBUTAN**  
**DIREKTUR DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Indonesia yang memiliki berbagai adat, kebudayaan dan tata cara kehidupan yang tersebar dalam kehidupan tiap-tiap etnis di Indonesia merupakan kekayaan yang perlu mendapat perhatian khusus, karena di balik keanekaragaman ini tersimpan potensi persoalan etnosentrisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, diperlukan pengkajian dan penggalian berbagai aspek kebudayaan daerah yang tersebar di Indonesia.

Bertitik tolak dari kondisi ini penerbitan naskah *Gerakan Nasionalisme di Aceh (1916 - 1942)* sebagai salah satu usaha untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat merupakan usaha yang patut dihargai. Penelitian dan pengkajian yang bertujuan untuk menggali kembali nilai-nilai budaya daerah sebagai akar kebudayaan nasional diharapkan juga dapat menumbuhkembangkan sikap cinta tanah air dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap kebudayaan nasional.

Dengan demikian akhirnya diharapkan dapat menghilangkan sikap etnosentrisme yang sempit yang ada di dalam masyarakat kita yang majemuk serta dapat memperkuat ketahanan dan persatuan bangsa.

Terbitnya buku ini tidak terlepas dari dorongan berbagai pihak antara lain Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dan tim penulis. Namun buku ini belum dapat dikatakan sempurna sehingga di dalamnya mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang diharapkan dapat disempurnakan di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga memungkinkan terbitnya buku ini kami ucapkan terimakasih. Akhir kata mudah-mudahan buku ini ada manfaatnya bagi pembaca.

Jakarta, Mei 1998

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Anhar Gonggong', with a long horizontal stroke extending to the right.

**Dr. Anhar Gonggong**  
NIP. 130 321 407

**SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Indonesia adalah sebuah negara multi etnik yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya. Keanekaragaman tersebut merupakan sebuah kekayaan yang perlu mendapat perhatian khusus. Kekayaan ini mencakup wujud-wujud kebudayaan yang didukung oleh masyarakatnya. Setiap suku bangsa itu memiliki nilai-nilai budaya yang khas, yang membedakan jati diri mereka daripada suku bangsa lain. Perbedaan ini akan nyata dalam gagasan-gagasan dan hasil-hasil karya yang akhirnya dituangkan lewat interaksi antarindividu, antarkelompok, dengan alam raya di sekitarnya.

Keadaan di atas dapat menjadi sebuah “bencana” karena dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa atau dapat mendatangkan berkah karena pemasukan devisa dari turis yang ingin melihat keanekaragaman suku dan budaya tersebut. Berangkat dari kondisi di atas, maka perlu diupayakan pembinaan, pengkajian dan penelitian nilai-nilai budaya dari setiap suku bangsa/daerah. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila guna tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya.

Karenanya, saya dengan senang hati menyambut baik terbitnya naskah *Gerakan Nasionalisme di Aceh (1916-1942)* hasil kegiatan penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, dalam rangka menginformasikannya kepada masyarakat tentang masalah-masalah kesejarahan dan nilai tradisional.

Tentunya hasil penelitian yang disajikan dalam buku ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut pada masa yang akan datang. Namun saya mengharapkan buku ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan dan acuan guna memperluas cakrawala pembaca serta bahan penelitian lebih lanjut.

Selain itu, dengan hadirnya buku semacam ini masyarakat Indonesia yang majemuk dapat saling memahami sejarah dan kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian, akan

dapat memahami dan mengerti tentang berbagai budaya yang melandasi kesatuan dan persatuan.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian dan penyelesaian buku ini.

Banda Aceh, Mei 1998

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H.A. Malik Raden', with a long horizontal stroke extending to the right.

**Drs. H. A. Malik Raden, MM**

NIP. 130 336 793



# DAFTAR ISI



Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II BEBERAPA KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA DI ACEH PADA AWAL ABAD XX .....</b>	<b>4</b>
1. Perjuangan Bersenjata Rakyat Aceh dan Politik Kekerasan Militer Belanda .....	4
2. Politik Pasifikasi .....	9
<b>BAB III PENGARUH PENDIDIKAN BARAT DAN LAHIRNYA BERBAGAI ORGANISASI PERGERAKAN DI ACEH .....</b>	<b>33</b>
1. Pembaharuan Sistem Pendidikan Keagamaan .....	33
2. Lahirnya Berbagai Organisasi Pergerakan .....	36
<b>BAB IV ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL KHAS ACEH .....</b>	<b>62</b>
1. Atjeh Vereeniging (Serikat Aceh) .....	62
2. PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>88</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada awal abad XX, di Jawa dan daerah-daerah lain di Nusantara termasuk daerah Aceh, mulai timbul gerakan nasionalis dalam bentuk organisasi-organisasi moderen yang berada di bawah pimpinan para Cendekiawan Indonesia. Melalui organisasi-organisasi ini mereka (Cendekiawan Indonesia) berusaha mengantisipasi tindakan-tindakan pemerintah kolonial Belanda yang menekan atau menindas bangsa Indonesia di samping juga berusaha untuk meningkatkan derajat dan martabat bangsa sehingga dapat bebas dari belenggu penjajahan. Namun gerakan-gerakan yang timbul di daerah Aceh pada awal abad XX itu dapat dikatakan unik bila dibandingkan dengan di daerah-daerah lain. Karena di samping munculnya gerakan Nasionalis dalam bentuk berbagai organisasi sosial politik seperti di daerah-daerah lain, juga masih ada aksi-aksi perlawanan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau berperang secara bergerilya yang terdapat di hampir seluruh wilayah Aceh.

Semenjak berdamainya Sultan Muhammad Dawod Syah (1903) yang merupakan Sultan Kerajaan Aceh yang terakhir, daerah Aceh secara De Jure telah dinyatakan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bagian dari wilayah *Nederlandsch Indie* (Hindia Belanda). Dalam melakukan pemerintahannya di Aceh, pemerintah kolonial Belanda membagi daerah Aceh menjadi dua bagian, yaitu pertama yang disebut *Gouvernement Gebied* (daerah gubernemen) yang diperintah langsung oleh pemerintah Hindia Belanda dan kedua disebut *Zelfbestuurgebied* (daerah berpemerintahan sendiri) yang diperintah secara tidak langsung. Daerah-daerah ini disebut *landschap* (kenegerian), dipimpin oleh para *Uleebalang* (hulubalang) yang telah menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Hindia Belanda atau bagi mereka yang telah menandatangani *Korte Verklaring* (perjanjian singkat) dengan Belanda. Kedua daerah ini dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda disebut *Gouvernement Atjeh en Onderhorigheden* (Gubernemen Atjeh dan daerah takluknya), yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Bersamaan dengan pengaturan sistem pemerintahan, pemerintah

kolonial Belanda dalam rangka pelaksanaan *Etische Politiek* (politik etis) dan politik pasifikasi memperkenalkan pula beberapa budaya barat seperti sistem pendidikan moderen, pengobatan moderen, komunikasi/transportasi, irigasi kepada rakyat Aceh. Dengan demikian, meskipun pada mulanya apa yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda itu sulit diterima, namun dalam perkembangan dan kenyataannya, berbagai unsur budaya barat itu terserap juga ke dalam masyarakat Aceh. Akibatnya timbul gejala adanya kegoncangan sistim tata nilai masyarakat Aceh. Ada masyarakat yang menerima dan mendukung sistim barat tersebut, seperti ikut bekerja dalam struktur birokrasi pemerintahan kolonial Belanda, menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah, yang menerima sistim pengobatan moderen dan sebagainya. Di samping itu juga ada masyarakat baik di kalangan *Uleebalang*, ulama dan rakyat yang terus melanjutkan perang gerilya. Mereka tidak menerima sistim pendidikan Belanda, menolak sistim pengobatan moderen dan tetap bertahan dengan sistim tradisional.

Namun demikian di samping adanya segi-segi yang dianggap tidak membawa kebaikan bagi masyarakat Aceh, ada pula segi-segi positifnya. Diantaranya ialah lahirnya sekelompok kaum cendekiawan Aceh hasil didikan barat, lancarnya hubungan dengan luar daerah sehingga telah membuka cakrawala pikiran masyarakat Aceh secara lebih luas. Kaum cendekiawan atau terpelajar ini mengerti bahwa mereka atau rakyat Aceh senasib dengan rakyat di daerah-daerah lain. Akibat lebih lanjut yaitu, mereka menjadi lebih sadar akan tanggung jawabnya terhadap tanah air, bangsa dan agama serta lebih mengerti mengenai taktik dan strategi perjuangan untuk mencapai cita-cita, yaitu bebas dari belenggu penjajahan atau merdeka. Hal inilah yang mendorong mereka untuk mendirikan berbagai organisasi sosial politik di Aceh. Diantara organisasi ini ada yang bersifat nasional. Mereka juga, dalam upaya untuk mengimbangi sekolah-sekolah bikinan pemerintah kolonial, mendirikan sekolah-sekolah swasta seperti sekolah Belanda dan memodernisir sistim pendidikan tradisional yang disebut *dayah* ke sistim yang moderen yang dinamakan madrasah. Ini berarti di kalangan masyarakat Aceh pada awal abad XX telah mulai tumbuhnya kesadaran nasional.

Dengan demikian selama periode kebangkitan nasional (1900/1942) di daerah Aceh, aksi menentang atau melawan kekuasaan kolonial Belanda berlangsung melalui dua jalur ; yaitu, pertama melalui perlawanan secara fisik, berperang secara bergerilya, dan kedua melalui jalur pergerakan nasional yang ditandai dengan tumbuhnya berbagai organisasi sosial dan politik serta sekolah-sekolah swasta/madrasah yang modernis. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh rakyat Aceh pada awal abad XX seperti juga yang dilakukan oleh rakyat di daerah lain di Indonesia telah membuahkan hasil yaitu hengkangnya pemerintah kolonial Belanda dari bumi Indonesia, sehingga akhirnya tercapai Indonesia Merdeka dan daerah Aceh seperti juga bekas wilayah Hindia Belanda lainnya, menjadi bagian dari wilayah negara Republik Indonesia.

## BAB II

### **BEBERAPA KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA DI ACEH PADA AWAL ABAD XX**

#### **1. Perjuangan Bersenjata Rakyat Aceh dan Politik Kekerasan Militer Belanda.**

Perang Belanda di Aceh yang meletus sejak tahun 1873, hingga awal abad XX belum berakhir. Meskipun Sultan Aceh sudah berdamai (1903) dan beberapa pemimpin perlawanan telah gugur, seperti Teuku Umar, Teungku Chik Di Tiro serta tertangkapnya Cut Nyak Dhien (1905), tetapi perlawanan-perlawanan bersenjata tetap terus berlanjut sepanjang masa Pergerakan Nasional (1908-1942). Perjuangan rakyat Aceh dalam melawan kolonialis Belanda itu, sebagaimana dikatakan oleh seorang penulis dari kalangan Belanda sendiri, Paul Van't Veer dalam bukunya *De Atjeh Oorlog*, lamanya dapat dibandingkan dengan perang 80 tahun (1568-1648) yang pernah berlangsung di negeri Belanda, yaitu perang antara Belanda dengan Spanyol. Bahkan perang yang terjadi di Aceh pada akhir abad XIX dan awal abad XX tersebut korbannya jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan perang 80 tahun. Menurut Paul Van't Veer dalam perang di Aceh telah jatuh korban di pihak Aceh 21.865 jiwa, hampir 4 persen dari jumlah penduduk pada waktu itu dan angka ini antara tahun 1909 hingga 1914 (masa Pergerakan Nasional) meningkat menjadi 23.198 jiwa.

Sesuai dengan perkembangan zaman perlawanan menghadapi kolonial Belanda pada awal abad XX yang dilakukan para pejuang Aceh dilakukan dengan dua cara. Yaitu dengan perang gerilya secara berkelompok dan secara perorangan. Diantara perlawanan yang dilakukan secara berkelompok/bergerilya dapat disebutkan misalnya yang dilakukan rakyat Aceh Utara yang dipimpin oleh Pang Nanggroe dan Cut Nyak Meutia (1910-1919). Selain itu juga yang dipimpin oleh Teungku Di Mata Ie bersama dengan pengikutnya (1913-1937). Begitu pula di daerah Gayo dan Alas, pada tahun 1908 Pang Bedok Mampang bersama anak buahnya menghancurkan bivak Belanda di Samarkilang. Dalam tahun

1925 dan 1926 sekelompok gerilyawan yang dipimpin oleh Muhammad Din dari Gayo Luas menyerang Tangsi Belanda di Blang Kejeren. Demikian pula di Lokop (Serbojadi) perang gerilya diteruskan di bawah pimpinan Datuk Pending II, Pang Akob dan Srikandi Inem Manyak Tri. Namun Datuk Pending II berhasil ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Nusa Kambangan, sementara Inem Manyak Tri gugur pada tahun 1916.

Daerah-daerah yang luas di pesisir Barat dan Selatan Aceh, merupakan medan gerilya yang amat strategis bagi pejuang-pejuang Aceh. Salah seorang tokoh gerilya yang sangat terkenal yaitu Teuku Ben Mahmud Blang Pidie. Pada tahun 1907 ia memimpin pertempuran melawan Belanda di Lhok Paoh, Manggeng. Akibatnya istri, putri dan cucunya Teuku Sabi ditawan oleh Belanda. Untuk menembus keluarganya itu Teuku Ben terpaksa menghentikan perlawanan dan ia melapor diri kepada Belanda pada bulan Juli 1908 beserta dengan 160 pengikutnya. Namun pada tahun 1914 dengan tuduhan berusaha hendak mengkoordinir kembali perlawanan di Aceh Barat, Selatan, Teuku Ben Blang Pidie dibuang ke Ambon dan dua tahun kemudian anaknya Teuku Banta Sulaiman, juga ikut dibuang, sedang anaknya yang lain, Teuku Karim beserta dengan istrinya tetap melanjutkan perlawanan. Pada tahun 1925-1928 di Bakongan terjadi perang antara Gerilyawan Aceh yang dipimpin oleh Teuku Raja Angkasah dan Cut Ali dengan pihak Belanda. Pada waktu itu panglima-panglima lasykar rakyat yang terkemuka seperti T. Mulod, Panglima Nyak Ben, Panglima Itam, Teungku Puteh, Pang Ahmad, Datok Nyak Neh, Pang Raja Lela, Imum Sabi, T. Nago, T. Karim (anak T. Ben Blang Pidie) dan Teuku Raja Tampok. Kesemua mereka menurut laporan politik Belanda pada tahun 1926 menyebutkan bahwa sebagai bahaya besar bagi ketentraman Belanda di Aceh. Dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi dengan pihak Belanda, satu persatu para panglima-panglima ini gugur. Pada bulan Maret 1926 dalam pertempuran di Krueng Batee gugur T. Mulod. Selanjutnya Teungku Puteh gugur dalam pertempuran di dekat Mesjid Krueng Luah, Datok Nyak Neh di Pantan Bili, Pang Ahmad di Terbangsan dan Teuku Cut Ali di Gunong Ijo pada tanggal 25 Mei 1927 bersama dengan Imum Sabi dan T. Nago.

Perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang Aceh ini diakui oleh Belanda sebagai suatu perlawanan yang hebat dan menyulitkan pihak Belanda untuk menghadapinya. Menurut laporan Belanda, selama perlawanan ini telah jatuh korban di pihak Belanda 32 orang tewas, tiga diantaranya perwira, sedang yang luka-luka seorang perwira dan 3 orang prajurit. Sementara di pihak Aceh telah gugur 152 orang. Dalam tahun 1928, gerakan-gerakan perlawanan yang cukup berarti adalah gerakan yang dipimpin oleh Teungku Amin di Tapak Tuan, pemberontakan Bidin Keubay di Lhok Pawoh Utara dan serangan Khadem Ambon di daerah Manggeng, Tapak Tuan. Meskipun gerakan ini untuk sementara dapat dipadamkan oleh pihak Belanda, namun 5 tahun kemudian (1933) pecah lagi perlawanan rakyat di Lhong dan Leupung (1937) Aceh Besar. Demikian pula perlawanan yang dipimpin oleh Teuku Raja Tampok di daerah Aceh Barat yang sudah berlangsung bertahun-tahun, hingga tahun tiga puluhan masih tetap merupakan momok bagi pemerintah kolonial Belanda di Aceh. Menjelang kedatangan Jepang, Teuku Manan yang telah berumur 96 tahun bersama dengan kawan-kawannya melancarkan aksi perlawanan terhadap Belanda.

Perlawanan yang dilakukan secara perseorangan terkenal dengan istilah yang dinamakan oleh Belanda *Atjeh Moorden* (pembunuhan-pembunuhan Aceh). Pembunuhan-pembunuhan ini sasarannya orang-orang Belanda (laki-laki-wanita dan anak-anak) yang dianggap kafir. Dapat terjadi di mana saja, di jalan, pasar, tangsi Belanda dan sebagainya. Hal ini tentu saja erat hubungannya dengan Gerakan perang Sabil. Si Pelaku pembunuhan juga mengharapkan dirinya mati, karena menurut anggapannya, kematian dalam melawan orang kafir akan merupakan mati-syahid dan masuk surga. Pembunuhan yang bermotifkan anti kafir ini dinamakan juga oleh orang Belanda di Aceh, *Het is een typische Atjeh Moord*, suatu pembunuhan khas Aceh. Perlawanan secara perseorangan ini mulai berlangsung di Aceh sejak meredanya perang kolonial Belanda di Aceh dan hingga tahun tiga puluhan masih terjadi. Misalnya pada tanggal 10 Juli 1933 seorang Kapten Belanda yang bernama C.E Schmid menjadi korban apa yang dinamakan pembunuhan khas Aceh ini di Lhoksukon, Aceh Utara. Dua bulan sesudahnya terjadi

lagi peristiwa serupa, di depan sebuah bivak tentara Belanda di Bakongan Aceh Selatan. Sasarannya seorang Sersan Belanda dan pada akhir bulan Nopember 1933 terhadap dua orang anak Belanda di Kutaraja.

Berdasarkan laporan Belanda aksi yang dilakukan oleh orang Aceh ini, antara tahun 1910-1920 telah terjadi 79 kali kasus pembunuhan, dengan korban di pihak Belanda 12 orang meninggal dan 87 orang luka-luka. Sementara di pihak Aceh 49 orang tewas. Puncak dari perjuangan/pembunuhan nekad ini terjadi dalam tahun 1913, 1917 dan 1928, yaitu sampai 10 kasus lebih setiap tahunnya. Sedangkan di tahun 1933 dan 1937 masing-masing 6 dan 5 kasus.

Atas dasar beberapa data yang diutarakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa hingga sekitar tahun tiga puluhan keadaan politik, terutama yang berhubungan dengan keamanan di Aceh, masih belum dianggap aman oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini diakui pula oleh penguasa-penguasa pemerintah Hindia Belanda di Aceh seperti A.H Philips, A. Ph. Van Aken yang masing-masing sebagai Gubernur di Aceh pada tahun 1929-1932 dan 1932-1936. Dengan demikian jelas bahwa perjuangan bersenjata rakyat Aceh melawan Belanda (meskipun telah memasuki masa Pergerakan Nasional) tidak pernah berhenti sampai pada bulan Maret 1942, saat pemerintah Hindia Belanda meninggalkan daerah Aceh dan tidak pernah kembali lagi.

Untuk menghadapi perlawanan bersenjata para pejuang Aceh sejak akhir abad XIX dan pada awal abad XX pihak Belanda telah melakukan berbagai upaya atau cara. Salah satu diantaranya yaitu dengan membentuk sebuah pasukan elit yang diberi nama *Het Korps Marechaussee* (Pasukan Marsose). Pasukan ini terdiri dari serdadu - serdadu pilihan yang dianggap cukup berani untuk menerobos pertahanan para pejuang Aceh ke seluruh pelosok Aceh. Pada mula dibentuk (20 April 1890) pasukan ini hanya satu divisi yang dibagi dalam dua belas brigade. Selanjutnya pada tahun 1897 diperluas menjadi dua divisi dan pada tahun 1899 ditambah lagi menjadi lima divisi dengan jumlah pasukan seribu dua ratus orang. Pasukan ini dalam melaksanakan tugasnya bertindak sangat keras/kejam, lebih-lebih pada masa



pemerintahan Gubernur Sipil dan Militer Van Heutsz (1898-1904), Van Der Wijk (1904-1905) yang paling terkenal pada masa Van Daalen (1905-1908). Di bawah pimpinannya telah melakukan kekejaman-kekejaman dan aksi-aksi teror yang luar biasa, sehingga mengakibatkan ratusan penduduk Aceh laki-laki dan wanita serta anak-anak terbunuh.

Karena tindakan-tindakannya yang sangat kejam tersebut Van Daalen mendapat kecaman dari orang-orang Belanda sendiri yang dimuat dalam beberapa surat kabar di negeri Belanda seperti *Avondpost* di kota Den Haag. Akibatnya Van Daalen meminta berhenti sebagai Gubernur militer Belanda di Aceh. Ia menganggap dirinya tidak bersalah, karena menurut pendapatnya ia hanya menjalankan tugas yang telah digariskan oleh Gubernur sebelumnya, yaitu Van Heutsz. Akibat politik kekerasan yang dilaksanakan Belanda di Aceh, banyak ulama terkemuka syahid. Di antaranya Teungku di Alue Keutapang, Teungku Kadli, Tengku di Cot Cicem, Tengku Leman, Teungku Chiek Paya Bakong dan beberapa ulama Tiro. Meskipun demikian tujuan Belanda untuk membuat Aceh aman dan takluk tidak juga dapat terlaksana. Hal ini dapat dilihat dalam *Kolonial Verslag* (laporan kolonial) tahun 1908 yang memberitakan adanya perlawanan pihak Aceh, seperti di Lhok Seumawe, Lhok Sukon, di Idi dan Tapak Tuan.

Pada 10 Juni 1908, Van Daalen digantikan oleh Letnan Kolonel H.N.A Swart yang sebelumnya menjadi Gubernur Militer dan Sipil di Sulawesi. Gubernur Swart pada mulanya juga melaksanakan politik kekerasan. Ia tetap melakukan pengejaran-pengejaran terhadap para ulama dan pengikut-pengikut mereka. Pada bulan September 1909 Syahid Teungku di Buket dan Teungku Chiek Mayet, keduanya putra Teungku Chiek di Tiro Muhammad Saman. Selain itu juga menyerahnya T. Banta dengan seratus orang pengikutnya (Juni 1908), T. Ben Blang Pidie bersama seratus enam puluh orang pengikutnya (Juli 1908). Para ulama lainnya yang gugur akibat politik kekerasan Belanda ini di antaranya yaitu, Teungku di Kunat (November 1909), Teungku di Reubee (Desember 1909), Habib Ahmad (Mei 1910), Teungku Saleh, Teungku Kalipah, Teungku Ma'at (Maret 1911), Teungku di Barat (Februari 1912).

Oleh karena banyaknya para ulama yang gugur sebagai pemimpin perang dalam melawan Belanda dan secara berangsur-angsur menyerahnya sebagian para *Uleebalang* (sebagai pemimpin adat), mengakibatkan sejak tahun 1912 ada yang menganggap bahwa perang Belanda di Aceh telah berakhir. Namun sebagaimana telah disebutkan di atas, sebenarnya perang tersebut masih tetap berlanjut. Perang tersebut dapat dikatakan tidak pernah selesai sampai Belanda angkat kaki dari bumi Aceh pada tahun 1942 saat masuknya bala tentara Jepang. Dengan demikian tidaklah berlebih-lebihan bila seorang penulis Belanda G.B. Hooyer dalam bukunya yang berjudul *De Krijgsgeschiedenis Van Nederlandsch-Indie Van 1811 tot 1894*, jilid III menyatakan bahwa tidak ada perang Kolonial lain di Indonesia yang sedahsyat peperangan Belanda di Aceh dan perang melawan Aceh ini akan merupakan tempat belajar bagi tentara Belanda. Sementara penulis Belanda lainnya yaitu Paul Van 't Veer dalam karyanya *De Atjeh Oorlog* juga menyebutkan, tidak pernah Belanda melakukan perang yang lebih besar dari pada perang Aceh. Dalam hal lama masa berlangsungnya dari tahun 1870 sampai 1942, perang ini dapat dibandingkan dengan perang delapan puluh tahun. Demikian pula dalam hal jumlah orang yang tewas dari kedua pihak, lebih dari seratus ribu jiwa, sehingga perang ini sebagai peristiwa militer yang tiada bandingnya bagi negeri Belanda.

## **2. Politik Pasifikasi**

Karena politik kekerasan yang dilaksanakan dianggap gagal maka pada awal abad XX juga Pemerintah Hindia Belanda merubah lagi kebijaksanaannya dalam cara menaklukkan Aceh. Mereka melakukan suatu kebijaksanaan baru yang disebut politik pasifikasi, lanjutan dari gagasan yang dianjurkan oleh C. Snouck Hurgronje. Suatu politik yang menunjukkan sikap damai yang ditunjukkan melalui berbagai usaha dalam bidang politik, ekonomi dan kebudayaan. Dengan politik ini, Belanda mulai memperlihatkan sikap lunak kepada masyarakat Aceh. Untuk mengamankan Aceh, mereka tidak lagi bertindak hanya dengan mengandalkan kekerasan, tetapi juga dengan usaha-usaha lain yang dapat

menarik simpati rakyat. Para pemimpin adat atau *Uleebalang* dan rakyat yang bersedia menghentikan perlawanan dan menyerahkan diri kepada Belanda, mereka diperlakukan secara baik dan dibantu untuk memperoleh kehidupan yang wajar kembali. Bagi mereka yang hendak mengusahakan pertaniannya atau mau membuka usaha perkebunan diberi modal dan dilindungi oleh pemerintah Belanda. Selain itu pemerintah Hindia Belanda juga meningkatkan kecerdasan rakyat, terutama anak-anak *Uleebalang* dengan memperkenalkan pendidikan Barat kepada mereka. Memperbaiki kesehatan rakyat dengan sistem pengobatan modern, pembuatan jalan-jalan raya, jalan kereta api dan pelabuhan-pelabuhan; serta yang paling menonjol ialah memajukan perkembangan ekonomi daerah dan ekonomi rakyat, baik melalui cara dalam bentuk eksploitasi maupun dengan membangun berbagai prasarana yang menyangkut kepentingan rakyat.

Pemerintah Hindia Belanda beranggapan bahwa jika ekonomi daerah dan ekonomi rakyat maju, maka penghidupan rakyat akan menjadi lebih baik dan lebih makmur, sehingga ketentraman dan ketertiban daerah akan lebih terjamin. Dengan demikian diharapkan rakyat Aceh tidak lagi memusuhi atau memerangi Belanda dan rakyat akan dapat melupakan penderitaan-penderitaan yang mereka alami akibat berperang dengan Belanda dalam waktu yang lama. Pada akhirnya diharapkan rakyat Aceh akan menyerah secara definitif kepada Belanda. Karena mereka harus menyadari bahwa tidak ada jalan lain kecuali bekerja sama, serta menghargai usaha-usaha pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan menegakkan kepastian hukum serta memajukan ekonomi.

Tanggapan masyarakat Aceh terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda tersebut, pada mulanya berbeda-beda. Para pemimpin adat (kelompok *Uleebalang*) ada yang menuruti kehendak Belanda, di samping juga ada yang masih terus melakukan perlawanan. Para pemimpin agama (ulama) ada yang berdiam diri saja, ada pula yang mengikuti *Uleebalang* bekerja pada pemerintah Hindia Belanda dan juga yang terus mengangkat senjata. Demikian pula dengan kelompok rakyat, ada yang mengikuti ajakan pemerintah dan

ada pula yang terus mengadakan perlawanan bersama pemimpin-pemimpin mereka yang masih tetap melanjutkan perlawanan. Namun ketika politik pasifikasi dilaksanakan secara lebih intentif, sebagian besar *Uleebalang* dari jumlah sekitar 100 orang, telah berdamai dengan Belanda dan bersedia menanda tangani perjanjian singkat yang antara lain berisi pernyataan tunduk serta mengakui kedaulatan Belanda atas wilayah mereka. Demikian pula perlawanan rakyat menjadi semakin mengendor, sehingga perlawanan-perlawanan dalam bentuk perang gerilya sudah jarang terjadi. Selanjutnya mulai terlihat perubahan sikap rakyat ke arah menerima dan pasrah terhadap hal-hal yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Para *Uleebalang* yang telah tunduk, dilibatkan bekerja pada struktur birokrasi Belanda dengan diangkat secara resmi sebagai *Zelfbestuurder* dari *Landschappen* atau kenegerian masing-masing, dan diberi gaji tetap oleh pemerintah.

Perintisan ke arah perbaikan ekonomi dalam rangka politik pasifikasi di Aceh, sebenarnya sudah mulai pada masa pemerintahan Gubernur Sipil dan Militer Van Heutsz (1898-1904), berbarengan dengan politik “keras” yang dilaksanakannya. Tetapi intensifikasinya baru dijalankan di bawah pemerintahan Gubernur H.N.A Swart (1908-1918). Swart, dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukannya berhasil meletakkan dasar bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi di Aceh. Politik “keras” yang dianut oleh penguasa-penguasa sebelumnya (Van Heutsz, Van Der Wijk dan Van Daalen), mulai di kesampingkan. ia berusaha untuk mendekati rakyat dengan memperlihatkan sikap damai dan bijaksana. Berkat uang dan tindakan-tindakan yang bersahabat dalam bentuk pemberian hadiah-hadiah, tunjangan-tunjangan dan bintang-bintang jasa kepada sejumlah *Uleebalang*. Swart berhasil meyakinkan dan mengikut sertakan mereka untuk bekerja sama dalam membangun ekonomi di Aceh.

Oleh karena jasa-jasanya dalam “mengamankan” dan keberhasilan-keberhasilan memajukan pendidikan dan perekonomian, Swart kemudian digelar sebagai “Pasificator Van Atjeh”. Selain itu ia juga mendapat penghargaan dari sejumlah *Uleebalang* pada saat ulang tahunnya yang

ke 70 (dalam tahun 1933). Para *Uleebalang* ini mengirim surat ucapan selamat ulang tahun disertai seperangkat hadiah kepada Swart. Dalam surat tersebut mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Swart yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan ekonomi di Aceh, sehingga daerah Aceh pada waktu itu tidak ketinggalan bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sumatera dan wilayah Hindia Belanda lainnya. Isi surat yang berkenaan dengan hal tersebut, antara lain sebagai berikut :

“Kami sekalian tidak loepa, tetapi selaloe ingat sekalian djasa serta kebaikan dari jang moelia toean Besar jang doeloe-doeleoe kepada kami sekalian dan begitoe djoega oentoeok tanah Atjeh, tanah tempat toempah darah kami, jang moelia senang dan aman dan dapat kemakmoeran serta mendapat sekolah-sekolah (onderwijs) jang sekedarnja, jang mendjadi tiang atas ketjerdasan sesoeatoe negeri, ialah moelia semendjak didalam pemerintahan jang moelia toean Besar Gouverneur “H.N.A SWART” di tanah Atjeh, moelai dari tahoen 1908 sampai 1918 dan seteroesnya sampai sekarang ini, itoe semoea kami pendoedoek tanah Atjeh tidak dapat meloepakan, jang tentoe djoega kami berasa, pada pehak jang moelia toean Besar tidak meloepakan, tetapi selaloe mendjadi peringatan dan kenang-kenangan djoega, bagi tanah tempat toempah darah kami (tanah Atjeh) jang doeloe oleh jang moelia toean Besar soedah beroesaha boeat memadjoekannja sampai mendjadi soeatoe negeri jang aman dan makmoer seperti sekarang ini, jang tidak kalah kalau dibandingkan dengan bahagian (gewest) lain dalam bahagian Nederlandsche Indië”.

Pengganti-pengganti Swart, Van Sluys (1918-1923), Hans (1923-1926), Goedhart (1926-1930), Philips (1930-1933), Van Aken (1933-1936), Jongejans (1936-1940), dan yang terakhir J. Pauw (1940-1942) tetap melaksanakan tindakan-tindakan yang mengarah ke politik pasifikasi. Politik yang semula dimaksud untuk dapat menundukkan Aceh, namun secara tidak langsung telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan nasionalisme di daerah Aceh.

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda dalam rangka politik pasifikasi dapat dikatakan cukup berhasil. Keadaan ekonomi dan politik di daerah Aceh menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda menjadi bertambah baik. Keamanan daerah semakin lebih mantap; rakyat mulai percaya terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kehidupan ekonomi yang sebelumnya mengalami kemunduran akibat perang dengan Belanda, juga menjadi semakin meningkat; terutama jika dilihat dari segi hasil-hasil produksi dan ekspor beberapa jenis hasil pertanian. Sehingga daerah Aceh pada waktu itu telah sejajar dengan daerah-daerah lain dalam wilayah Hindia Belanda.

Di lain segi, adanya berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda sehubungan dengan politik pasifikasi, telah menyebabkan timbulnya beberapa perubahan dalam masyarakat Aceh. Rakyat Aceh mulai mengenal sistem pertanian baru dan daerah Aceh makin terbuka bagi pendatang-pendatang dari luar. Posisi politik dan kedudukan ekonomi para *Uleebalang* menjadi berubah dan Aceh mulai terkait pada politik kolonial, ekonominya berubah wajah menjadi ekonomi kolonial dalam bentuk-bentuk eksplotasi.

Tujuan pemerintah Hindia Belanda untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian di Aceh, tidak terlepas dari kepentingan politis. Pembangunan sarana-sarana perhubungan (jalan-jalan raya dan jalan kereta api) lebih ditekankan pada kepentingan politis dari pada kepentingan ekonomis. Pembuatan jalan dimaksudkan sebagai usaha untuk membebaskan daerah-daerah yang terisolir. Karena dengan adanya jalan-jalan itu memungkinkan penduduk melakukan kontak yang terus menerus dengan dunia luar, sehingga mentalitas mereka di daerah-daerah yang telah terbuka itu akan mengalami perubahan dan dengan demikian akan membuat keadaan politik menjadi lebih baik. Begitu pula dengan bangunan beberapa irigasi besar, meskipun biaya untuk itu sangat besar jumlahnya bila dibandingkan dengan kepentingan ekonomis, tetapi tetap dilaksanakan. Karena dalam hal ini pemerintah telah menempatkan keuntungan politik di atas kepentingan ekonomi.

Meskipun dalam beberapa hal politik pasifikasi ini dapat dikatakan berhasil, tetapi apakah pihak Belanda benar-benar telah berhasil menaklukkan Aceh? Karena menurut kenyataan, Belanda tidak pernah mengalami masa damai yang sesungguhnya di daerah Aceh.

### 3. Memperkenalkan Pendidikan Barat

Akibat proses politik, bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Aceh termasuk daerah yang terlambat menerima sistim pendidikan dari pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan ini mulai diperkenalkan kepada rakyat Aceh, baru pada permulaan abad XX.

Ada dua faktor utama yang mendorong pemerintah Hindia Belanda memasukkan sistim pendidikan mereka ke daerah Aceh. Pertama, dapat dilihat dalam hubungan dengan sistim politik kolonial pada pertukaran abad XX, yaitu sejalan dengan visi politik ethis yang mereka jalankan, yang salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan pegawai-pegawai administratif yang trampil menurut ukuran mereka. Pegawai-pegawai yang berasal dari kalangan pribumi ini diusahakan agar dapat dijadikan sebagai aparat-aparat yang efektif dalam melancarkan sistim ekonomi dan struktur birokrasi mereka. Maka sehubungan dengan kepentingan ini pemerintah kolonial Belanda menginginkan adanya pengembangan sistim pendidikan mereka kepada kalangan penduduk pribumi. Kedua, munculnya satu kelompok baru dalam kalangan pemerintah kolonial Belanda yang dipelopori oleh seorang orientalis terkemuka yaitu C. Snouck Hurgronje yang terkenal dengan konsepsinya politik pasifikasi. Kelompok ini beranggapan bahwa perlawanan-perlawanan bersenjata dari bangsa Indonesia (salah satu diantaranya adalah perlawanan yang diberikan oleh rakyat Aceh) dalam menentang pemerintah kolonial Belanda, terutama adalah digerakkan oleh sistem nilai dalam agama Islam. Perlawanan-perlawanan ini hanya mungkin dapat diselesaikan atau dikurangi, kalau golongan bangsawan atau pemuka-pemuka adat dari daerah setempat (dalam hal ini di Aceh adalah golongan *Uleebalang*) dapat ditarik ke dalam lingkungan kebudayaan dan sistem nilai mereka

(sistem nilai Barat). Untuk ini kelompok tersebut menyarankan kepada pemerintah Belanda agar dapat menciptakan suatu golongan elite baru yang dibina dan dididik dengan kebudayaan dan sistem nilai Belanda. Dengan sistem ini diharapkan mereka yang telah dibina dan dididik itu tidak lagi mengikuti seruan para pemimpin agama Islam (para ulama) untuk tetap menentang Belanda, sehingga dengan sendirinya pengaruh sistem nilai dalam Islam sebagaimana dikumandangkan lewat para ulama seperti yang terjadi di Aceh dapat dikurangi.

Seperti di daerah-daerah lain di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan golongan bangsawan setempat sebagai perantara antara mereka dengan rakyat, yang dalam hal ini di Aceh melalui golongan *Uleebalang*. Maka oleh karenanya golongan yang pertama kali diperkenalkannya sistem pendidikan Belanda di Aceh adalah golongan *Uleebalang* yang merupakan golongan bangsawan Aceh. Mereka inilah yang dikehendaki oleh golongan C. Snouck Hurgronje supaya dipisahkan atau dijauhkan dari para pemimpin agama.

Sehubungan dengan maksud di atas, maka sejak tahun 1900 mulailah diperkenalkan sistem pendidikan pemerintah kolonial Belanda kepada mereka. Pada tahun itu beberapa putra *Uleebalang*, di antaranya dua orang saudara dari *Uleebalang* Idi Rayeuk telah diikutsertakan untuk mengikuti pendidikan pada sebuah sekolah Belanda di Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Dan pada tahun 1901 tiga putra *Uleebalang* lainnya dari daerah Aceh Besar, sesudah bersekolah pada sebuah sekolah Belanda di Kutaraja, oleh pemerintah Hindia Belanda di Aceh dikirim ke Fort de Kock (sekarang Bukit Tinggi) untuk memasuki sekolah guru di sana. Selanjutnya pada tahun 1907/1908 hingga tahun dua puluhan terdapat sejumlah putra-putra *Uleebalang* yang dikirim ke luar Aceh untuk mengikuti berbagai macam pendidikan yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda. Misalnya *Hoofdenzoonsschool* di Asahan, OSVIA di Bandung dan Serang, *Bestuurschool* di Batavia (sekarang Jakarta), dan MOSVIA di Madiun.

Hampir bersamaan waktunya dengan diperkenalkannya pendidikan kepada anak-anak *Uleebalang*, pemerintah Hindia Belanda juga



memikirkan pendidikan kepada pemuda-pemuda Aceh lainnya yang berasal bukan dari kelompok *Uleebalang* atau dari kalangan rakyat biasa. Hal ini dimaksudkan selain untuk mendapat pegawai rendahan (sesuai dengan salah satu tujuan politis etis), juga untuk mengurangi pengaruh dari pemimpin-pemimpin agama atau para ulama dalam mengurangi kefanatikan mereka terhadap permusuhannya dengan Belanda (sesuai dengan konsepsi C. Snouck Hurgronje). Maka untuk ini pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah rendah atau sekolah rakyat seperti halnya dengan sekolah desa di pulau Jawa. Di Aceh pada mulanya sekolah-sekolah jenis ini disebut dengan nama sekolah *mukim*.

Tidak seperti halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, di daerah Aceh jenis pendidikan dasar atau rendah yang diusahakan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah sangat terbatas. Misalnya tidak semua jenis pendidikan seperti yang ada di pulau Jawa juga terdapat di Aceh. Dalam hal ini yang terdapat di Aceh adalah *Volkschool* (dengan masa belajar 3 tahun), *Vervolgschool* (dengan masa belajar 2 atau 3 tahun), *Meisjesschool* (dengan masa belajar 2 atau 3 tahun), *De 2de klasseschool* (sekolah-sekolah kelas dua, dengan masa belajar 2 tahun), *Inlandsche School*, (sekolah Melayu), *Europeesche Lager School (ELS)*, *Hollandsch Inlandsche School (HIS)*, *Hollandsch Chinesche School* (khusus buat anak-anak orang Cina) dan *Hollandsch Ambonsche School* (khusus untuk anak-anak orang Ambon yang berdinias pada militer Belanda di Aceh).

Adapun sekolah rakyat atau sekolah desa pertama yang didirikan di Aceh adalah tanggal 30 Desember 1907, yang diprakarsai oleh Gubernur Militer/Sipil Aceh dan Daerah-Daerah takluknya pada masa itu yaitu Van Daalen. Sekolah ini didirikan di wilayah Aceh Besar distrik Ulee Lheue yang pada mulanya diberi nama *Sikula Mukim* (sekolah mukim) dengan jumlah murid 38 orang. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 1908 di desa Lam Lagang (juga dalam wilayah Aceh Besar) di buka lagi sekolah serupa, dengan jumlah murid pada mulanya 35 orang. Di bawah pemerintahan Gubernur Swart (yang menggantikan Van Daalen) pada tanggal 10 Juni 1908, sekolah-sekolah rakyat ini semakin dikembangkan. Pada akhir tahun 1908 jumlah sekolah ini di wilayah

Aceh Besar sudah mencapai 21 buah. Hingga bulan Desember 1909, jumlah ini untuk seluruh daerah Aceh sudah mencapai 63 buah. Setahun kemudian atau pada bulan Desember 1910, jumlah ini meningkat lagi menjadi 85 buah, yang dapat dibagi disetiap *afdeeling* adalah sebagai berikut : *afdeeling Groot Atjeh* (Aceh Besar) 53 buah, *afdeeling Noordkust Van Atjeh* (Aceh Utara) 11 buah, *afdeeling Oostkust Van Atjeh* (Aceh Timur) 9 buah, *afdeeling Westkust Van Atjeh* (Aceh Barat) 8 buah dan *afdeeling Alaslanden* (Negeri Alas) 4 buah.

Seperti telah disebutkan bahwa di bawah pemerintahan Gubernur Swart, sekolah-sekolah rakyat di seluruh Aceh terus dikembangkan. Adapun perincian jumlah sekolah ini beserta jumlah muridnya sejak tahun 1911 hingga masa akhir jabatan Gubernur Swart sebagai Gubernur Aceh dan daerah-daerah takluknya (1918) adalah sebagai berikut : Tahun 1911 jumlah sekolah 106 buah; tahun 1912 jumlah sekolah 125 buah dengan jumlah murid 6000 orang; tahun 1913 jumlah sekolah 151 buah dan jumlah murid 6800 orang; tahun 1914 jumlah sekolah 165 buah dan jumlah murid 8200 orang; tahun 1915 jumlah sekolah 184 buah dan jumlah murid 10700 orang; tahun 1916 jumlah sekolah 196 buah dan jumlah murid 11300 orang; pada tahun 1917 jumlah sekolah 220 buah dan jumlah murid 12261 orang; dan pada tahun 1918 jumlah sekolah menjadi 250 buah dengan jumlah murid 14751 orang. Adapun jumlah tenaga pendidik (guru) pada akhir tahun 1918 adalah sebanyak 490 orang; jadi kira-kira 2 orang guru untuk sebuah sekolah dan 1 orang guru untuk 30 orang murid. Sebagian besar guru-guru ini terdiri dari orang-orang pendatang, yaitu orang-orang Mandailing (Tapanuli) dan orang-orang Minangkabau; sedang dari kalangan suku Aceh sendiri sangat terbatas.

Oleh karena pada umumnya guru-guru pendatang ini tidak mengerti bahasa Aceh, sedangkan murid-murid sekolah rakyat ini terutama yang berada di desa-desa tidak mengerti bahasa Melayu yang oleh pemerintah Belanda dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah itu, maka tentu saja hal ini mengurangi minat pada murid-murid untuk bersekolah. hal ini merupakan suatu masalah tersendiri bagi pemerintah Hindia Belanda.

Pada mulanya didirikan sekolah-sekolah rakyat *digampong-gampong* (kampung-kampung) di Aceh, pemerintah Hindia Belanda mengalami banyak masalah. Di antaranya selain karena masalah kekurangan guru dan sedikit sekali guru-guru yang dapat berbahasa Aceh seperti telah disinggung di atas, juga masalah yang datang dari *teungku-teungku* atau para pemimpin agama (ulama) yang pada umumnya tidak setuju dengan hadirnya sekolah-sekolah buatan Belanda di Aceh. Selain itu juga dari orang-orang tua murid, terutama para ibu yang tidak mau anak-anak mereka bersekolah pada sekolah yang dianggap buatan orang kafir. Para ibu ini lebih senang anak-anak mereka tetap tinggal di rumah membantu mereka bekerja, baik pekerjaan yang di rumah ataupun di sawah-sawah dan ladang-ladang mereka. Dalam hal pendidikan buat anak-anaknya mereka serahkan kepada *teungku-teungku* atau para ulama yang mengusahakan sistem pendidikan (pendidikan agama) baik di *meunasah-meunasah* maupun di *dayah-dayah* atau pasantren-pasantren.

Sehubungan dengan masalah-masalah di atas, pemerintah Hindia Belanda di Aceh mencoba memberi penjelasan-penjelasan kepada rakyat melalui para *Uleebalang*; bahwa pendidikan yang mereka berikan pada sekolah-sekolah rakyat itu tidak bertentangan dengan *hukom* atau syariat Islam. Oleh karena mata pelajaran yang diberikan atau diajarkan pada sekolah-sekolah rakyat tersebut (selama masa 3 tahun ajaran) pada umumnya adalah; membaca (tulisan Latin dan bahasa Aceh yang pada mulanya digunakan buku "Doea Silayeue" buah tangan Nyak Cut, seorang putra *Uleebalang* di Aceh Besar yang pernah dikirim oleh pemerintah Hindia Belanda bersekolah pada *Kweekschool* di Bukit Tinggi), menulis dalam huruf Latin dan huruf Arab serta dikte dalam kedua huruf tersebut, berhitung dan pecahan sederhana, latihan berbicara dan bercakap-cakap, dan sedikit diberikan pengetahuan ilmu bumi tentang Hindia Belanda (Indonesia). Sedangkan uang sekolah yang dikenakan bagi murid-murid yang harus dibayar oleh orang tua mereka juga tidak banyak, yaitu sekitar f 0.10 hingga f 0.15 (antara 10 sampai 15 sen) pertahun. Dalam prakteknya uang sekolah ini pada masa-masa awal didirikan sekolah-sekolah tersebut belum dipungut bayaran, tetapi kemudian dipungut berkisar antara 5 sampai 10 sen saja. Adapun sekolah

setiap hari dimulai pada pukul 8 dan berakhir pukul 11 atau selambat-lambatnya pukul 11.30; sedang pada hari Jumat dan hari Minggu serta pada hari-hari besar, sekolah diliburkan; dan pada bulan puasa (bulan Ramadhan) sebulan penuh diliburkan.

Untuk mengatasi masalah-masalah atau kesukaran-kesukaran yang dihadapinya pemerintah Hindia Belanda telah mengambil beberapa tindakan, misalnya untuk mengatasi kekurangan guru, maka sejak tahun 1909 dengan surat keputusan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 29 Desember 1909 No. 23, di Kutaraja mulai didirikan sebuah *Normaal Cursus*, dengan maksud khusus untuk mendidik guru-guru sekolah rakyat untuk daerah Aceh. Kursus ini mulai dibuka pada tanggal 7 Februari 1910 yang pada mulanya hanya dikunjungi oleh 12 orang siswa.

Sehubungan dengan maksud meramaikan sekolah-sekolah rakyat, pihak pemerintah Hindia Belanda mengerahkan para kontroleurnya dan meminta bantuan para *Uleebalang* yang mau bekerja sama, supaya memaksa orang-orang tua yang tidak mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah itu. Terhadap mereka yang membangkang, didenda atau di hukum dengan bekerja pada pembuatan-pembuatan jalan-jalan atau yang disebut rodi. Oleh karenanya kalau tidak disertai dengan paksaan, dapat dipastikan bahwa sekolah-sekolah rakyat itu pada mulanya akan menjadi kosong. Dan agar sekolah-sekolah ini tetap dikunjungi oleh murid-murid, maka pihak *Uleebalang* yang diserahi tugas untuk mengawasi sekolah-sekolah itu selalu mengadakan tekanan-tekanan terhadap orang tua si murid. Oleh karena takut terhadap sanksi yang diterapkan oleh *Uleebalang* yang bersangkutan, menyebabkan orang-orang tua mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah dilaporkan oleh A. Vogel (selaku Inspektur Pendidikan Bumi Putra) pada tahun 1919, bahwa pada mulanya pendidikan ini di Aceh tidak tumbuh secara wajar, tetapi dipaksakan karena rakyat di Aceh waktu itu pada umumnya belum menyukainya.

Suatu permasalahan lain yang dihadapi pemerintah Hindia Belanda pada sistem pendidikan sekolah-sekolah rakyat di Aceh adalah berkenaan dengan maksud pemerintah untuk mengganti bahasa Melayu dengan

bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah tersebut. Sesuai dengan konsep Van Mook (salah seorang tokoh konservatif dalam kalangan pemerintah Hindia Belanda, yang terkenal dengan politik *divide et impera*) yang menghendaki agar kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia dihidupkan kembali; maka pada tahun 1931 pemerintah Hindia Belanda di Aceh menghendaki supaya bahasa Aceh dipergunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat, di samping bahasa Melayu yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Adapun alasan yang diberikan pemerintah kepada rakyat Aceh adalah dengan menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar, murid-murid akan lebih cepat mengerti dan cepat menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Di samping juga rakyat akan dapat membaca dan menulis bahasa ibunya sendiri dengan menggunakan huruf-huruf Latin, sehingga bahasa Aceh sebagai bahasa literatur akan dapat dihidupkan kembali. Untuk daerah-daerah Gayo, Alas, Tamiang dan Singkel yang bukan bahasa Aceh sebagai bahasa ibu, bahasa Melayu akan tetap dipertahankan sebagai bahasa pengantar.

Rupa-rupanya para cendekiawan Aceh yang di antaranya terdiri dari beberapa tokoh *Uleebalang* tidak dapat menyetujui maksud pemerintah Hindia Belanda tersebut, meskipun pemerintah dalam hal ini telah memberi penjelasan-penjelasan. Para cendekiawan Aceh menganggap usaha pemerintah itu akan mencegah berkembangnya bahasa Melayu di Aceh. Dengan demikian akan menghambat rakyat Aceh untuk mengerti bahasa tersebut yang amat diperlukan bagi pengembangan ekonomi mereka, dan dalam berhubungan dengan suku-suku lain di sekitarnya. Tetapi pemerintah Hindia Belanda di Aceh tetap bersikeras untuk melaksanakan rencana itu. Maka pada tanggal 1 Juli 1932, menetapkan secara resmi pemakaian bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat sebagai pengganti bahasa Melayu kecuali di beberapa daerah seperti telah disebutkan di atas.

Meskipun bahasa Aceh telah ditetapkan sebagai bahasa pengantar sejak tanggal 1 Juli 1932, tetapi bahasa Melayu pada beberapa sekolah masih tetap digunakan. Menurut laporan umum pemerintah Hindia Belanda tentang pendidikan di Aceh pada tahun 1933 dan tahun 1934, masih terdapat 88 buah sekolah rakyat yang berada di kota-kota besar di

Aceh yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, dan yang lainnya (sebanyak 207 buah) telah menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa bantu/pengantar. Adapun perinciannya di setiap kota-kota besar yang terdapat di Aceh sebagai berikut :

- A. Yang telah menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar atau bahasa bantu; Langsa 16 buah, Lhok Seumawe 60 buah, Sigli 42 buah, Kutaraja 42 buah, Meulaboh 30 buah dan Tapak Tuan 17 buah.
- B. Yang tetap menggunakan bahasa Melayu; Langsa 38 buah, Lhok Seumawe 5 buah, Sigli 6 buah, Kutaraja 7 buah, Meulaboh 1 buah dan Tapak Tuan 34 buah.

Menurut J. Jongejans yang menjabat sebagai Residen di Aceh sejak 5 Maret 1936 hingga bulan September 1938, pada tahun 1939 dari 328 buah jumlah sekolah rakyat yang terdapat di seluruh Aceh, 210 buah di antaranya telah menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa bantu/pengantar di samping bahasa Melayu.

Pada akhir tahun 1920, jumlah sekolah-sekolah rakyat di seluruh Aceh adalah 266 buah dengan tenaga pengajar 527 orang dan jumlah murid 16435 orang, yang terdiri dari 14515 orang laki-laki dan 1920 orang murid perempuan. Pada akhir tahun 1921 menjadi 275 buah, dengan guru 539 orang, dan jumlah murid 16674 orang; yang terdiri dari 14352 orang murid laki-laki dan 2322 orang murid perempuan. Pada tahun 1922 jumlah ini meningkat lagi menjadi 287 buah dengan jumlah guru 553 orang dan jumlah murid 16991 orang; yang terdiri atas 14636 orang murid laki-laki dan 2355 orang murid perempuan. Menurut memori serah terima jabatan Gubernur Aceh dan daerah-daerah takluknya, A. Ph. Van Aken pada Februari 1936, jumlah sekolah rakyat di seluruh Aceh pada akhir masa jabatannya (tahun 1936) adalah 321 buah dengan jumlah murid 33553 orang; di antara mereka terdapat 9871 orang atau 29% murid perempuan.

Menjelang masa akhir pemerintah Hindia Belanda di Aceh (1939), jumlah sekolah-sekolah rakyat atau sekolah desa di seluruh Aceh mencapai 348 buah, dengan lebih dari 600 orang pendidik dan lebih dari 36000 orang murid.

Selain sekolah rakyat atau sekolah desa, pada tahun yang hampir bersamaan dengan pemerintah Hindia Belanda di Aceh juga mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak perempuan atau yang disebut *Meisjescholen*. Sekolah khusus untuk anak perempuan ini pertama didirikan pada tanggal 1 Mei 1910, juga di distrik Ulee Lheue Mukim Meuraksa (seperti halnya sekolah rakyat yang pertama). Usaha pendirian sekolah ini ikut dibantu oleh uleebalang setempat yang bernama Teuku Teungoh. Pada pertengahan tahun 1914 jumlah sekolah-sekolah puteri yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Aceh, sudah meningkat menjadi 7 buah, yang lokasinya menyebar di seluruh *afdeeling*, di Aceh, yaitu di Aceh Besar (Ulee Lheue, Kutaraja, dan Lamreueung), *Westkust van Atjeh* (Meulaboh), *Noordkust van Atjeh* (Meureudu), *Oostkust van Atjeh* (Peureulak), dan *Alaslanden* (Kutacane), dengan jumlah murid seluruhnya 418 orang.

Dalam mengembangkan sekolah-sekolah puteri ini, beberapa isteri pejabat tinggi pemerintah Hindia Belanda di Aceh seperti Nyonya Swart (isteri Gubernur Swart), Nyonya Nijs (isteri Asisten Residen Nijs), dan Nyonya Doornik (isteri Residen Doornik) turut memberikan jasa-jasa mereka, terutama dalam memajukan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Tujuan mereka sebenarnya tidak terlepas dari kepentingan politik pemerintah Hindia Belanda di Aceh, yaitu dalam hubungan untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta mengurangi kefanatikan wanita-wanita Aceh dalam permusuhannya dengan Belanda. Oleh karena mereka juga telah pernah mendengar, mengetahui dan melihat bagaimana peranan yang telah dimainkan oleh beberapa wanita Aceh dalam peperangannya dengan Belanda.

Pada setiap sekolah puteri ini, umumnya mempunyai lokal atau kelas 4 atau 5 lokal. Adapun lamanya jam pelajaran biasanya mulai dari setengah delapan, jam delapan atau setengah sembilan pagi hingga pukul satu siang. Sebagian besar waktu disekolah ini digunakan untuk belajar keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan tangan, seperti menjahit, merenda, bordir, sulam-menyulam, adat istiadat/sopan santun, dan lain-lain yang berhubungan dengan kewanitaan.

Seperti juga pada sekolah-sekolah rakyat, di sekolah-sekolah puteri ini, juga terjadi pemaksaan terhadap orang-orang tua murid agar mengirim anak-anak perempuan mereka untuk mengikuti pendidikan pada sekolah-sekolah tersebut. Untuk ini para *Uleebalang* juga berperan sebagai perantaranya. Sama halnya dengan pada sekolah rakyat, jika tidak disertai dengan paksaan, tentu sekolah-sekolah puteri ini pada mulanya juga akan menjadi kosong.

Perkembangan sekolah-sekolah puteri ini, meskipun tidak sepesat perkembangan pada sekolah rakyat, tetapi setiap tahunnya juga menunjukkan jumlah yang meningkat. Misalnya pada tahun 1916, jumlah sekolah ini sudah mencapai 9 buah dengan jumlah murid 704 orang. Dua tahun berikutnya atau pada tahun 1918, jumlah ini meningkat menjadi 20 buah, dengan jumlah murid 1321 orang.

Sebagai lanjutan dari sekolah-sekolah rakyat, yang wujudnya untuk memberi pendidikan dasar kepada rakyat, maka seperti halnya di tempat-tempat lain di Indonesia pada masa itu, juga di Aceh oleh pemerintah Hindia Belanda didirikan sekolah yang disebut *Vervolgschool* (sekolah sambungan atau lanjutan). Sekolah ini merupakan lanjutan dari sekolah rakyat. Murid-murid dari sekolah rakyat atau sekolah desa yang telah berhasil menamatkan pelajarannya, mereka dapat melanjutkan pendidikannya pada sekolah-sekolah sambungan ini. Adapun lamanya pendidikan atau masa belajar pada sekolah ini hanya dua tahun. Seperti namanya sekolah sambungan (*vervolgschool*) dari sekolah rakyat, maka sekolah-sekolah ini kadang-kadang ada yang ditempatkan dalam satu bangunan dengan sekolah-sekolah rakyat; yang pada umumnya baik gedung maupun perlengkapan-perengkapan belajar yang digunakan masih sangat sederhana. Sama halnya dengan sekolah rakyat, di sekolah-sekolah ini pada mulanya bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa pengantar kecuali pada sebuah *vervolgschool* yang berada di Sabang, yang oleh karena tidak terdapat sekolah HIS di sana, maka ditetapkan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar).

Pada umumnya sekolah-sekolah ini dikunjungi oleh anak-anak rakyat atau anak penduduk *gampong* (kampung) yang ekonomi mereka lebih baik dari juga oleh anak-anak dari pegawai rendahan, dengan tujuan



agar anak-anak mereka dapat menikmati pendidikan lebih lanjut dari pada sekolah rakyat.

Adapun mata pelajaran yang diberikan pada sekolah-sekolah ini adalah sebagai lanjutan dari pada sekolah rakyat, misalnya seperti mata pelajaran berhitung yang sedikit lebih tinggi dari pada yang diberikan pada sekolah rakyat; selain itu juga diberikan pelajaran hitung dagang, memegang buku, dan lain-lain. Oleh karena pemerintah Hindia Belanda di Aceh berkeinginan untuk mengarahkan pendidikan di sekolah-sekolah ini terhadap kebutuhan-kebutuhan mendesak, yaitu yang berkecenderungan ke bidang pertanian, maka ada diantara *vervolgschool* di Aceh yang dibuka satu kelas khusus lagi tentang pertanian. Di sini mata pelajarannya, di samping murid-murid harus praktek di perkebunan-perkebunan besar milik pemerintah, juga diadakan *ekskursi-ekskursi* ke beberapa tempat. Juga kepada murid-murid diberikan pelajaran-pelajaran tentang teori-teori sederhana yang berhubungan dengan pertanian, peternakan, perikanan, perbankan, tentang kredit rakyat, dan lain-lain.

Oleh karena jumlah tenaga pengajar yang tersedia masih sangat terbatas, maka perkembangan sistim pendidikan ini di Aceh sangat lambat. Menurut J. Jongejans, hingga tahun 1938 jumlah sekolah-sekolah sambungan/lanjutan (*Vervolgschool*) di seluruh Aceh adalah 40 buah, dengan jumlah pendidik/guru hampir 100 orang dan jumlah murid lebih dari 3200 orang. Sementara menurut A. J. Piekaar, pada akhir tahun 1939 jumlah sekolah-sekolah ini di seluruh Aceh sudah mencapai 45 buah.

Di samping sekolah-sekolah sambungan/lanjutan seperti tersebut di atas, di Aceh juga terdapat jenis pendidikan dasar milik pemerintah lainnya, yaitu yang disebut *Hollandsch Inlandsche School* atau HIS, dengan lamanya masa pendidikan/belajar 7 tahun. Berbeda dengan jenis pendidikan pada sekolah-sekolah rakyat dan sekolah-sekolah sambungan, di lembaga HIS ini berbagai fasilitas yang disediakan untuk keperluan belajar jauh lebih baik. Baik gedung maupun alat-alat perlengkapan belajar yang digunakan cukup permanen dan baik. Adapun bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Mata pelajaran yang diajarkan di sekolah ini di antaranya adalah Bahasa

Belanda (dalam hal ini sangat ditekankan pada berbicara dan dapat menulis dengan baik dalam bahasa itu), berhitung, ilmu bumi, sejarah, biologi, melukis dan olah raga. Pelajaran-pelajaran ini sebagian diberikan dalam bahasa Belanda dan sebagian dalam bahasa Melayu. Para pendidik/guru pada umumnya terdiri dari orang-orang pribumi, akan tetapi semua guru kepala pada sekolah ini dipegang oleh orang-orang Eropa atau Belanda.

Diploma atau ijazah dari sekolah ini, dapat memberi kesempatan kerja atau jabatan yang sangat didambakan oleh orang-orang pribumi yang bekerja sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda. Dan pada umumnya pendidikan di HIS ini terutama diperuntukkan bagi murid-murid yang datang dari lingkungan yang berbahasa Belanda. Oleh karenanya murid-murid yang banyak mengunjungi sekolah ini adalah anak-anak dari golongan bangsawan Aceh (para *Uleebalang*) dan anak-anak dari pegawai tinggi pemerintah yang mempunyai kedudukan; dan berasal dari kalangan penduduk pribumi saja. Menurut catatan J. Jongejans, pada sekitar tahun tiga puluhan, banyak sekali permintaan dari masyarakat Aceh, terutama dari kalangan mereka yang berduit agar dapat menyekolahkan anak-anak mereka pada sekolah ini. Tetapi permintaan ini ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda.

Oleh karena ketatnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memasuki sekolah ini, maka pintu sekolah HIS hanya terbuka kepada anak-anak golongan bangsawan dan anak-anak dari mereka yang berkedudukan saja; sedangkan bagi anak-anak dari kalangan rakyat biasa ataupun anak-anak dari saudagar-saudagar yang meskipun mungkin mereka sanggup membiayai anak mereka bersekolah di sekolah ini, namun tetap sulit untuk diterima di HIS.

*Hollandsch Inlandsche School* di Aceh, oleh pemerintah Hindia Belanda didirikan hanya terbatas di kota-kota besar saja. Yang pertama didirikan adalah di Kota Kutaraja pada tahun 1915, selanjutnya pada tahun 1916 dibuka pula di Lhok Seumawe (*afdeeling noordkust van Atjeh*) dan di Langsa (*Afdeeling Oostkust van Atjeh*). Menurut laporan Inspektur pendidikan A. Vogel, jumlah murid pada ketiga sekolah HIS ini dalam

tahun 1918 adalah hampir mendekati 500 orang, dengan perincian sebagai berikut : di Kutaraja sebanyak 178 orang, di Lhok Seumawe 145 orang, dan di Langsa 175 orang murid. Berdasarkan laporan umum pendidikan di Hindia Belanda pada akhir tahun 1928, jumlah sekolah-sekolah ini di seluruh Aceh sudah meningkat menjadi 5 buah, dengan lokasi masing-masing di Kutaraja 1 buah, Langsa 1 buah, Lhok Seumawe 1 buah, Sigli 1 buah, Tapak Tuan 1 buah (*afdeeling westkust van Atjeh*) 1 buah yang didirikan pada tahun 1925. 52 di antara guru-guru yang pernah mengajar pada HIS di Tapak Tuan ini dapat disebut antara lain M. Jamil, A. Khatib, R. Abidin dan Ali Murtolo. Kecuali A. Khatib, kesemua guru-guru ini berasal dari Tapanuli dan Jawa. Pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda di Aceh, jumlah sekolah-sekolah ini sudah meningkat menjadi 8 buah.

Selain HIS yang khusus untuk anak-anak orang pribumi, pemerintah Hindia Belanda di Aceh juga mendirikan sebuah sekolah yang dinamakan *Hollandsch Chinese School* yang disingkat HCS, yang khusus diperuntukkan untuk anak-anak orang Cina; lokasi sekolah ini adalah di Kutaraja dan Tapak Tuan. Pada sekolah ini bahasa pengantar seluruhnya dipakai Bahasa Belanda. Pendirian sekolah ini dimaksudkan oleh pemerintah untuk mengurangi anak-anak Cina membanjiri sekolah-sekolah yang didirikan oleh orang-orang Cina sendiri. Selain itu juga agar orang-orang Cina tetap dapat dijauhkan dari orang-orang pribumi. Selain HCS, pemerintah juga mendirikan sekolah *Hollandsch Ambonsche School* yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak orang Ambon yang berdinasi pada militer Belanda, khususnya yang berada di Kutaraja. Sekolah ini pertama kali dibuka di Kutaraja pada bulan Oktober 1911.

Pendidikan dasar lainnya yang juga terdapat di Aceh adalah yang disebut *Europeesche Lager School* yang disingkat ELS, yang berarti sekolah rendah Eropa, sesuai dengan namanya, maka sekolah ini pada umumnya diperuntukkan hanya buat anak-anak orang Eropa atau Belanda dan sebagian kecil saja untuk anak-anak golongan bangsawan (*Uleebalang*). Jadi bagi anak-anak biasa sama sekali tidak diperkenankan untuk memasuki sekolah ini. Lama pendidikan atau belajar 7 tahun, dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.

Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti gedung dan alat-alat perlengkapan belajar lainnya sangat baik dan mewah bila dibandingkan dengan peralatan yang disediakan pada sekolah-sekolah rakyat.

Menurut laporan umum pendidikan di Hindia Belanda, pada tahun 1916 jumlah ELS di seluruh Aceh ada 4 buah. Dan 3 buah di antaranya hampir seluruh murid-muridnya terdiri dari anak-anak orang Eropa (Belanda); sedangkan yang satunya terdapat percampuran antara orang-orang Belanda dengan anak-anak bangsawan Aceh (*Uleebalang*). Selama itu rupa-rupanya pada sekolah yang terakhir ini, juga digunakan bahasa Melayu sekedarnya sebagai bahasa bantu, yang mungkin untuk membantu atau memudahkan anak-anak *Uleebalang* dalam mengikuti pelajaran pada sekolah tersebut. Hingga tahun 1928, jumlah sekolah ini di seluruh Aceh tetap 4 buah, yang masing-masing terdapat di Kutaraja, Langsa, Sigli, dan Sabang. Sampai akhir tahun 1939 jumlah ini masih tetap 4 buah.

Berdasarkan laporan Inspektur Pendidikan Sekolah-sekolah Bumi Putera A. Vogel, dapat diketahui bahwa di Aceh juga terdapat jenis pendidikan dasar lainnya yang disebut *De 2de klasse Scholen* (sekolah-sekolah kelas dua). Selain itu juga terdapat yang disebut dengan nama *Inlandsche School* (sekolah pribumi) atau yang lebih populer dengan nama sekolah Melayu; yang kesemuanya oleh pemerintah Hindia Belanda dinamakan *Inlandsche Gouvernementsscholen* (sekolah bumi putera pemerintah).

Pada umumnya sekolah-sekolah ini didirikan di kota-kota dan lamanya pendidikan 5 tahun bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu. Baik gedung maupun alat-alat perlengkapan belajar yang disediakan adalah sangat sederhana. Pada akhir tahun 1919, jumlah sekolah ini di seluruh Aceh ada 28 buah, dengan jumlah murid 4170 orang. Berapa jumlah sekolah dan jumlah murid serta jumlah pendidikan di sekolah ini, pada akhir masa pendudukan Belanda di Aceh, penyusun tulisan ini belum mendapatkan angka yang pasti.

Selain *Inlandsche School* (sekolah Melayu), di beberapa kota besar di Aceh juga didirikan sekolah yang disebut *Schakel School* (sekolah

penghubung), yaitu suatu lembaga pendidikan yang khusus disediakan buat murid-murid yang telah tamat belajar di *Vervolgschool*. Di sini bahasa pengantar diberikan dalam bahasa Belanda, sehingga untuk sekolah ini ada juga yang menyebutkan dengan *Vervolgschool met Nederlandsch*) (sekolah sambungan dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya). Lama belajar pada sekolah ini 3 tahun. Seperti halnya dengan sekolah Melayu dan sekolah-sekolah kelas dua, penyusun tulisan ini belum mendapatkan suatu angka yang pasti tentang keadaan sekolah penghubung ini pada akhir masa pendudukan Belanda di Aceh.

Kalau di atas telah dikemukakan beberapa jenis sekolah dasar, maka sebagai persiapan untuk memasuki pendidikan dasar tersebut (terutama untuk mereka yang akan masuk ke ELS dan HIS), pemerintah Hindia Belanda di Aceh telah mendirikan pula suatu lembaga yang disebut *Voorbereiden Onderwijs*. Lembaga ini mulai didirikan pada tahun 1915 di Kutaraja; dan mempunyai dua sekolah, yaitu yang pertama disebut *de neutrale Frobelschool* (sejenis pendidikan taman kanak-kanak yang muridnya campuran antara anak-anak Belanda, anak-anak militer orang Ambon dan anak-anak golongan bangsawan serta anak-anak dari mereka yang berkedudukan); kedua, yang disebut *de Roomschkatholieke Frobelschool* (khusus buat anak-anak yang beragama katolik Romawi).

Sesungguhnya pada tahun 1939, jumlah lembaga pendidikan dasar (sekolah-sekolah dasar) di seluruh Aceh sudah sedemikian rupa sebagaimana telah dikemukakan di atas, tetapi menurut sensus penduduk tahun 1930, orang-orang yang tidak buta huruf di Aceh (huruf Latin) diperkirakan 1,1 %, yang apabila dibandingkan dengan pulau Jawa yang pendidikan dasar (berupa sekolah-sekolah desa) sudah lama diadakan, jumlah orang-orang yang tidak buta huruf adalah 5,5 %; maka persentase yang tidak buta huruf di Aceh boleh dikatakan agak lumayan.

Menurut laporan umum pendidikan di Hindia Belanda tahun 1928, satu-satunya lembaga pendidikan menengah yang terdapat di Aceh dan Daerah-daerah takluknya. Ialah yang disebut *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* atau disingkat MULO, yang sejak zaman pendudukan Jepang hingga sekarang dikenal dengan nama Sekolah Menengah Pertama

(SMP). Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan pemerintah Hindia Belanda paling tinggi yang ada di Aceh, dan didirikan pertama kali pada tahun ajaran 1920/21 di Kutaraja dengan lamanya masa belajar 3 tahun. Berdasarkan memori serah terima jabatan Asisten Residen Aceh Besar C. E. Maier pada tanggal 17 Juni 1935, jumlah murid pada sekolah ini (tahun 1935) adalah 79 orang.

Pada mulanya pendirian MULO di Aceh selain dimaksudkan untuk menampung murid-murid yang telah menamatkan pendidikan pada HIS dan ELS yang berkeinginan untuk melanjutkan pelajarannya, juga dalam rangka untuk mendidik kader-kader *Uleebalang* yang trampil maka sehubungan dengan maksud tersebut, Gubernur van Aken yang merupakan Gubernur terakhir dari pemerintahan Hindia Belanda di Aceh, karena sesudahnya daerah Aceh berada di bawah seorang Residen menyebutkan bahwa pendidikan tingkat MULO sangat diperlukan di daerah Aceh, terutama untuk keluarga *Uleebalang* yang mampu dan untuk keluarga pemuka-pemuka adat lainnya. Lebih lanjut Van Aken menambahkan bahwa meskipun pemerintah Hindia Belanda di Aceh mengirim mereka, seperti ke Fort de Kock (Bukit Tinggi) Asahan dan juga Jawa untuk dididik di sana, tetapi akan lebih baik lagi bila mereka itu dapat dididik dengan pendidikan Barat dalam *millieu* (lingkungan) sendiri, agar mereka tidak begitu jauh dari lingkungan masyarakat dan kebudayaannya.

Hampir bersamaan dengan didirikannya MULO pemerintah juga telah mendirikan sebuah asrama yang diberi nama *Aijehsch Internaat*. Meskipun dalam statuta internaat itu bertanggal 27 Januari 1922 disebutkan bahwa internaat itu terbuka bagi segala suku bangsa yang berasal dari luar Kutaraja, tetapi dalam pelaksanaannya hanya diperuntukkan buat pemondokkan para siswa yang bersekolah di MULO dan HIS saja, yang umumnya terdiri dari putra-putra *Uleebalang*. Pada masa Residen Jongejans (1936-1938), mulai terbuka kesempatan yang luas kepada setiap suku bangsa (baik Eropah maupun Pribumi) untuk memasuki sekolah MULO. Menurut Jongejans, pada masa itu diantara murid-murid sekolah itu juga terdapat beberapa putra Aceh dari golongan

bangsawan. Menjelang akhirnya pemerintah Hindia Belanda di Aceh, jumlah sekolah ini tetap 1 buah; tetapi perhatian masyarakat terhadap jenis pendidikan ini semakin besar. Akibat dari adanya pendidikan ini, maka di Aceh telah lahir satu golongan yang berpendidikan menengah, sehingga mengharuskan pemerintah untuk mengadakan seleksi dalam penerimaan pegawai-pegawai pada berbagai jenis jabatan pemerintahan di Aceh pada masa itu.

Untuk memenuhi akan tenaga-tenaga tukang yang dapat mengisi jabatan-jabatan rendah pada lembaga-lembaga pemerintahan seperti masinis kereta api, perbengkelan, montir dan sebagainya, maka pemerintah Hindia Belanda membuka sebuah *Ambachtschool* (sekolah pertukangan) yang ditempatkan di *Atjeh Spoor Sigli* (*Noordkust van Atjeh*).

Pada mulanya sekolah ini dikhususkan dalam kejuruan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan logam (besi) dan kemudian juga dibuka bagian yang berhubungan dengan kayu. Menurut Gubernur Van Aken (1932-1936), jenis pendidikan tukang tersebut terutama tukang kayu adalah sangat sesuai untuk daerah Aceh pada masa itu, mengingat *oetoeih-oetoeih* (tukang-tukang) orang Aceh, terutama yang ahli membangun rumah-rumah Aceh maupun yang menempa besi-besi (*pande*) untuk membuat alat-alat senjata dan perlengkapan lainnya, tidak menunjukkan adanya perkembangan, baik dalam sistem maupun dalam teknik mereka bekerja; yang pada umumnya masih secara tradisional. Sehubungan dengan sekolah pertukangan ini, Van Aken juga menganjurkan supaya di Aceh didirikan pula sebuah kursus montir. Bagaimana perkembangan dan kelanjutan dari *Ambachtschool* yang didirikan di Sigli itu, penyusun belum mendapatkan data-data konkrit.

Menurut catatan R. Broesma dalam karyanya *Atjeh Als Land Voor Handel En Bedrijf*, di Kutaraja dalam tahun 1925 sudah terdapat sebuah *Ambachtschool*. A. J. Piekaar (bekas sekretaris Residen pemerintah Hindia Belanda yang terakhir di Aceh), juga menyebutkan bahwa pada akhir tahun 1939 di seluruh Aceh hanya terdapat sebuah sekolah tukang; dan sekolah tersebut berada di Kutaraja. Dapat ditambahkan bahwa

meskipun sangat langkanya sekolah tukang ini, tetapi beberapa kursus pertukangan (*Ambacht Leergang*) pada sekitar tahun tiga puluhan juga terdapat di Aceh. Di antaranya *Ambacht Leergang* yang terdapat di Tapak Tuan (dahulu termasuk dalam *Westkust Van Atjeh*) dengan guru-gurunya antara lain M. Yusuf dan M. Syam. Mengenai data-data yang konkrit tentang sekolah ini, penyusun juga belum mendapatkannya.

Seperti telah disinggung di atas, bahwa di Aceh (distrik Ulee Lheue) sejak tanggal 1 Mei 1910, telah didirikan sebuah *Meisjeschool* (sekolah puteri). Sampai tahun 1918, jumlah sekolah ini di seluruh Aceh sudah mencapai 20 buah dengan jumlah murid 1321 orang. *Meisjescholen* (sekolah-sekolah puteri) ini adalah identik dengan sekolah kejuruan wanita, karena yang diajarkan di sini pada umumnya adalah ketrampilan dengan pekerjaan tangan dan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan rumah tangga. Dalam perkembangannya sekolah puteri yang berada di Ulee Lheue itu, telah lebih dikhususkan lagi dalam hal pertenunan, sehingga sekolah ini pada sekitar tahun tiga puluhan, disebut juga terutama oleh orang-orang Belanda dengan nama *Weefschool* (sekolah pertenunan).

Menurut memori serah terima jabatan Gubernur Van Aken, pada masa pemerintahannya di Aceh sudah terdapat 2 buah sekolah pertenunan, yang satu berlokasi di Ulee Lheue seperti tersebut di atas, dan yang satu buah lagi di Samalanga (*Noordkust Van Atjeh*). Pada kedua sekolah kejuruan pertenunan ini, terutama diajarkan bagaimana cara bertenun dengan alat-alat yang digerakkan oleh tangan yang pada masa dahulu pernah terkenal di Aceh. Maka untuk ini motif-motif Aceh lama perlu diperkenalkan dan dihidupkan kembali melalui sekolah-sekolah kejuruan itu. Dalam hubungan dengan sekolah ini perlu disebutkan bahwa masing-masing *Uleebalang* di kedua daerah tempat sekolah tersebut didirikan ikut berpartisipasi membantu kelancaran jalannya pendidikan tersebut. Malahan Teuku Teungoh (*Uleebalang* mukim Meuraksa, Ulee Lheue) merelakan tempat tinggalnya digunakan untuk tempat sekolah tersebut. Berdasarkan beberapa sumber dapat diketahui bahwa di Aceh juga terdapat beberapa sekolah kejuruan, di antaranya yaitu *Normaal Cursus*





(kursus untuk mendidik guru-guru sekolah rakyat), *Ambachtschool* sekolah pertukangan, dan *Landbouwschool* (sekolah pertanian). Menurut J. Langhout, sekolah-sekolah kejuruan tersebut mulai didirikan di Aceh pada masa H.N.A. Swart menjadi Gubernur Aceh dan Daerah-daerah takluknya sejak tahun 1908-1918. Adapun *Normaal Curcus* mulai dibuka pada tanggal 7 Pebruari 1910 di Kutaraja; sedangkan *Landbouwscholen* (sekolah-sekolah pertanian) didirikan di Ulee Kareng (tidak begitu jauh dari Kutaraja dan di Beureunuen *Noordkust Van Atjeh*).

Kalau di atas telah disebutkan bahwa beberapa *Vervolgschool* di Aceh ditambah 1 tahun ajaran yang khusus diperuntukkan bagi pendidikan kejuruan pertanian dengan sistem kurikulum seperti juga telah disebutkan, maka pada beberapa sekolah lainnya juga telah ditambah dengan sebuah kelas lagi di mana murid-murid diberi tambahan pelajaran tentang Hitung Dagang dan Memegang Buku. Rupa-rupanya pendidikan kejuruan ini diperuntukkan khusus bagi mereka yang hendak bekerja dalam bidang perdagangan. Data-data yang konkrit tentang jenis pendidikan ini penyusun juga belum mendapatkannya.

### BAB III

## PENGARUH PENDIDIKAN BARAT DAN LAHIRNYA BERBAGAI ORGANISASI PERGERAKAN DI ACEH

### 1. Pembaharuan Sistem Pendidikan Keagamaan.

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa golongan yang pertama kali diperkenalkan sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda di Aceh adalah golongan *Uleebalang* yang merupakan golongan bangsawan Aceh. Umumnya anak-anak merekalah yang diberi prioritas atau kesempatan dalam pendidikan, terutama yang dapat memasuki sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Bagi anak-anak rakyat biasa yang meskipun mungkin orang tua mereka mampu untuk membiayai menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah-sekolah yang dimaksud, tetapi tidak diperkenankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi ada diskriminasi dalam penerimaan murid-murid untuk sekolah-sekolah tersebut.

Oleh karena adanya ketidakadilan dalam sistem pendidikan yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda ini, telah mendorong kelompok lain dalam masyarakat Aceh untuk membuat sekolah-sekolah sendiri ataupun berusaha memodernisir sistem pendidikan yang telah ada, yang mereka miliki.

Berkait dengan hal di atas, juga dapat dilihat bahwa dengan dimasukkannya sistem pendidikan Belanda ke Aceh, sedikit banyaknya telah melahirkan pula pendukung-pendukung utama dari sistem tersebut. Pendukung-pendukung ini dalam perkembangannya telah menjadi suatu kelompok baru dalam masyarakat Aceh. Kehadiran kelompok ini dengan sendirinya telah mengundang kecemasan dan kecurigaan kelompok-kelompok lain yang sudah ada (yang sudah established), lebih-lebih jika kelompok baru atau sipendatang itu menunjukkan kelebihan-kelebihan tertentu, yang diperkirakan akan dapat mendesak posisi yang dipunyai oleh kelompok-kelompok lain. Maka oleh karenanya kehadiran kelompok baru tersebut dianggap sebagai suatu ancaman dan merupakan

tantangan bagi kelompok-kelompok lain dalam masyarakat Aceh, khususnya kelompok yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang tradisional. Untuk mengimbangi kelompok baru itu, kelompok yang tersebut terakhir berusaha untuk meningkatkan diri, terutama memodernisir lembaga-lembaga pendidikan yang mereka miliki.

Faktor penting lainnya yang erat kaitannya dengan munculnya jenis pendidikan ini di Aceh, dapat pula dilihat dalam hubungan akibat modernisme Islam di Indonesia pada sekitar perempatan pertama abad XX. Muncul dan berkembangnya organisasi-organisasi modernis Islam pada tingkat nasional di antaranya Serikat Islam, Muhammadiyah dan Al-Irsyad yang cabang-cabangnya juga berdiri di Aceh, telah membawa angin baru pula terhadap sistem pendidikan keagamaan di daerah Aceh.

Sebelum berkenalan dengan sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda, masyarakat Aceh telah memiliki lembaga-lembaga pendidikan tradisional pengaruh agama Islam, yang pada umumnya dikelola oleh para pemimpin agama (ulama). Di antara lembaga-lembaga tersebut yaitu *Dayah/pesantren*, *Rangkang* dan *Meunasah*. Pecahnya peperangan dengan pihak Belanda yang berlangsung lama serta melelahkan, sangat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat Aceh, terutama para ulama. Oleh karenanya, selama kesibukan menghadapi peperangan tersebut, para ulama sedikit sekali berkesempatan untuk memimpin dan mengelola lembaga-lembaga pendidikan mereka dengan baik. Hal ini berakibat melemahnya sistem pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan tradisional tersebut.

Selanjutnya bersamaan dengan meredanya perang melawan Belanda tersebut, pada sekitar perempatan pertama abad XX, berbagai macam pengaruh modernisme Islam, baik yang melalui Minangkabau di mana banyak terdapat putra-putra Aceh pernah belajar agama di sana, maupun melalui Timur Tengah, dan ada pula yang melalui Pulau Pinang, serta tempat-tempat lain mulai masuk ke Aceh.

Pada perempatan pertama abad XX terdapat beberapa putra Aceh yang pernah belajar di Timur Tengah; diantaranya Tgk. M. Nur Ibrahimy,

tamatan Al-Azhar Cairo; beliau ikut aktif memodernisir sistem pendidikan agama di Aceh; dan Tgk. Syekh Abdul Hamid, seorang tokoh organisasi Serikat Islam cabang Aceh yang belajar di Makkah. Yang tersebut terakhir selama di Makkah pernah mengirim beberapa berita rahasia melalui celah-celah harian berbahasa Arab *Ummul Qura* yang terbit di sana kepada rekan-rekannya di Aceh, yang isinya berupa anjuran agar mereka berusaha memperbaharui sistem pendidikan agama di Aceh; yang menurutnya dengan jalan memperbaharui sistem pendidikan itu Aceh baru mungkin bangun kembali untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dengan masuknya berbagai pengaruh itu, mulai kelihatan adanya inisiatif dan usaha baru kaum ulama Aceh untuk membina kembali sistem pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan mereka, yaitu dengan mengadakan pembaharuan dari sistem *Dayah*, *Rangkang* dan *Meunasah* yang tradisional ke sistem Madrasah yang moderen. Di sini mulai diperkenalkan cara belajar baru yang berbeda dengan sistem pada lembaga-lembaga tradisional seperti tersebut di atas.

Materi pelajaran diperluas, antara lain dengan memasukkan beberapa pelajaran baru dengan ide-ide yang realistik yang berhubungan dengan kepentingan dan hubungan sosial di dalam masyarakat.

Dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang baru itu, selanjutnya memungkinkan bagi kaum ulama Aceh untuk tetap berperanan dominan dalam masyarakatnya serta sebagai tanda adanya perluasan cakrawala pemikiran mereka khususnya dalam bidang pendidikan. Hal ini semua tidak terlepas dari keinginan mereka untuk dapat mengimbangi sistem pemerintah Hindia Belanda yang terdapat di Aceh.

Pendirian lembaga madrasah pertama di Aceh dimulai pada tahun 1916, diberi nama Madrasah *Al Khairiyah* yang berlokasi di Kutaraja. Selanjutnya pada tahun dua puluhan muncul berbagai Madrasah di seluruh Aceh. Di antaranya yang terkenal yaitu, Madrasah Perguruan Islam yang didirikan pada tahun 1926; Madrasah *Nahdatul Islam* yang disingkat MADNI (1927); Madrasah *Saadah Adabiyah* (1929) yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh; dan Madrasah *Al-*

*Muslim* (1930). Kedua yang tersebut terakhir merupakan madrasah-madrasah paling terkenal di Aceh pada masanya dan mempunyai banyak cabang di seluruh Aceh. Pada tahun tiga puluhan perkembangan madrasah di seluruh Aceh terus meningkat, sehingga pada periode itu dapat disebutkan sebagai tahun pembangunan sekolah-sekolah agama di Aceh. Menurut buku *Verslag Pertemoean Oelama-oelama* pada tahun 1936, di seluruh Aceh terdaftar 91 buah madrasah. Sementara yang tidak terdaftar diperkirakan setengah dari padanya.

Dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan baru itu, dalam perkembangannya telah melahirkan suatu kelompok ulama yang modernis. Dan ini telah membuka kesempatan kembali bagi para ulama ini untuk berperan aktif dalam masyarakatnya, khususnya dalam bidang pendidikan dan politik.

## **2. Lahirnya Berbagai Organisasi Pergerakan Nasional**

Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda menjalankan pemerintahannya melalui bangsawan setempat yang dalam hal ini di daerah Aceh yaitu kaum *Uleebalang*. Untuk mengikutsertakan mereka dalam struktur birokrasi yang moderen, diperlukan *Uleebalang* yang moderen pula. Oleh karenanya para *Uleebalang* inilah lebih dahulu diperkenalkan dan dididik dengan sistem pendidikan Barat. Melalui kontak hampir setiap hari dengan orang Barat, pembicaraan-pembicaraan, pengamatan akan gaya hidup dan adat orang-orang Barat, timbullah nilai-nilai baru pada golongan bangsawan/*Uleebalang* Aceh. Sistem nilai dari masing-masing pribadi pemimpin-pemimpin adat ini, menentukan penerimaan elemen-elemen baru dalam kebudayaan dan mempercepat proses perubahan. Mereka yang merupakan lapisan atas dari masyarakat Aceh pada umumnya telah membebaskan diri dari sebagian nilai-nilai tradisional dan mengambil langkah yang menentukan untuk menerima sistem pendidikan Barat. Bahkan sebagian pemimpin adat/*Uleebalang* ini tidak hanya menerima pendidikan Barat, tetapi sesuai dengan wewenangnya menyebarkannya kepada rakyat.

Dalam perkembangannya pemuda-pemuda Aceh yang lulus dari sekolah-sekolah Belanda ada yang menjadi pegawai/aparat Belanda, mendapat pekerjaan di kantor-kantor pemerintah, di kantor-kantor kenegerian (*landschap*) dan lain sebagainya. Mereka yang lulus sekolah negeri yang berbahasa Belanda yang sebagian besar terdiri dari keluarga kaum *Uleebalang*, mendapat posisi yang lebih baik dari lulusan sekolah melayu. Jawatan-jawatan yang di perguruan, di kepolisian, di perusahaan kereta api negara dan lainnya, telah mulai terbuka untuk orang Aceh. Akibatnya timbullah diferensiasi sosial, mobilitas sosial dan stratifikasi sosial baru, bagi masyarakat Aceh. Perubahan-perubahan sosial ini menjadi pertanda awal zaman baru di Aceh.

Dari pemuda-pemuda Aceh yang telah mendapat pendidikan moderen ini, baik yang berasal dari sekolah pemerintah maupun dari sekolah agama yang sudah moderen, timbullah nilai-nilai baru yang menyangkut pandangan mereka tentang sekolah, pikiran untuk merubah adat yang telah dianggap usang dan keinginan untuk menghimpun diri dalam organisasi sosial politik untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Berdasarkan pengalaman mereka selama dalam pendidikan, terutama yang dilihat atau dialami sendiri di luar daerah Aceh, timbul suatu kesadaran untuk memulai perjuangan dengan cara-cara baru, tidak lagi dengan menggunakan senjata, tetapi melalui pergerakan nasional. Dengan demikian pergerakan nasional yang telah muncul di pulau Jawa sejak tahun 1908, dalam waktu relatif singkat telah bergema pula di daerah Aceh.

Serikat Islam (SI) merupakan organisasi kebangsaan yang pertama didirikan di Aceh. Pada mulanya muncul di Tapak Tuan pada tahun 1916, kemudian mendapat pengikut di tempat-tempat lain di Aceh, seperti : Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur dan lain-lain. Teuku Keujruen Chiek Muhammad Alibasyah, *Uleebalang* Samalanga, Teuku Abdul Hamid orang kaya Sri Maharaja, *Uleebalang* Lhok Seumawe, Teuku Chiek Muhammad Said dari Cunda, Teuku Abdul Latif dari Geudong, dan Teuku Raja Bujang dari Nisam Grugok bersama dengan ratusan rakyatnya menjadi anggota S. I.

Sampai tahun 1920 S. I. telah menjadi sebuah partai politik yang cukup kuat di Aceh, sehingga sempat mengkhawatirkan pemerintah Belanda di sana. Karena itu kegiatan para pemimpinnya selalu diawasi, sampai tiba saatnya, yaitu pada tahun 1926 dilakukan penangkapan secara besar-besaran terhadap tokoh-tokoh partai tersebut. Penangkapan ini sehubungan dengan adanya pemberontakan tahun 1926/1927 yang disponsori oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang juga sudah mulai merembes ke daerah Aceh, walaupun banyak dari tokoh di sana bukan berasal dari partai tersebut. Di antara tokoh S. I. yang ditangkap itu ialah: T. Chiek Muhammad Said Cunda, T. Abdul Latif Geudong dan T. Raja Bujang Nisam Grugok, masing-masing dibuang ke Sumatera Barat (Kemudian ke Jawa), ke Timor dan ke Irian Barat (Boven Digul). Salah seorang pemimpin S. I. yang lain, Ayah Hamid (Teungku Syekh Abdul Hamid) dari Samalanga, dapat terhindar dari penangkapan dan sempat melarikan diri ke Mekkah. Di sana ia bertemu dengan tokoh-tokoh pemuka agama dari Timur Tengah : Mesir, Irak, Iran, Turki, Syria dan lain-lain; sehingga timbullah ide padanya untuk memperbaharui sistem pendidikan Islam di Aceh, seperti yang dilihat dan didiskusikan di sana dengan para pemimpin tersebut. Cita-citanya itu segera disampaikan kepada pemimpin-pemimpin di Aceh, tetapi tidak melalui surat, karena sensor yang ketat pada waktu itu di Aceh, apalagi surat dari seorang tokoh yang dicari-cari, di samping ada kemungkinan tidak sampai juga berbahaya bagi yang menerimanya. Seperti telah disebutkan caranya ialah melalui harian berbahasa Arab "*Ummul Qura*" yang disampaikan ke sana, dicelah-celah berita dituliskan, dalam bahasa Arab pula, ide-idenya itu untuk dapat ditumbuhkan di Aceh. Teungku Syekh Abdul Hamid sangat menekankan bahwa sistim pendidikan *dayah* yang berlaku di Aceh sudah usang dan tidak mungkin dipertahankan lagi kalau umat Islam di Aceh ingin maju. Di antara yang pernah menerima harian tersebut adalah Teungku H. Abdullah Ujong Rimba (bekas anggota DPA mantan Ketua Umum Majelis Ulama Aceh) yang segera pula menyampaikannya kepada Teungku Mohammad Daud Beureueh di Lhok Seumawe (pada waktu itu sedang memimpin *Dayah* Uteuen Bayu atas prakarsa *Uleebalang* Lhok Seumawe T. Abdulhamid orang kaya Sri Maharaja).

Gagasan Teungku Syekh Abdul Hamid Samalanga telah ikut mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan Islam moderen di Aceh.

*Insulinde* yang pada bulan Juni 1919 berganti nama dengan *Nationaal Indische Partij (NIP)*, masuk ke Aceh pada bulan Februari 1919, walaupun sebelumnya telah ada tokoh partai ini, ialah Teuku Chiek Muhammad Thayeb *Uleebalang* Peureulak. Pada waktu itu didirikan cabang di Kutaraja dengan diketuai oleh Teuku Nyak Arif. Selain itu Teuku Nyak Arif pada tahun 1919 itu dipilih menjadi ketua Syarikat Aceh (*Atjeh Vereeniging*) menggantikan T. Chiek Muhammad Thayeb yang telah diangkat menjadi anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat) dari tahun 1918-1920 di Batavia. *Insulinde* (NIP) tampaknya tidak berkembang luas di Aceh, apalagi setelah Teuku Nyak Arif harus berhenti dari keanggotaannya (setidak-tidaknya sebagai ketua) pada tahun 1920 karena diangkat menjadi Panglima *Sagi XXVI* Mukim menggantikan ayahnya, dan kemudian pada bulan Mei 1923 induk partai ini di Pulau Jawa telah membubarkan diri.

Tokoh *Nationaal Indische Partij* (NIP) yang lain ialah Abdul Karim Ms (Abdoe' Ixarim Ms) yang bergerak di Aceh Timur. Begitu simpatiknya kepada NIP; sehingga untuk mengenang keanggotaannya di dalam partai tersebut, Abdul Karim Ms mengabadikan nama partai NIP. Kepada putranya yang bernama Nip Karim, yang juga seorang tokoh di dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. di daerah Sumatera Timur. Abdul Karim Ms termasuk seorang tokoh yang besar pengaruhnya dalam pergerakan politik di Aceh Timur. Setelah NIP. membubarkan diri, ia menjadi pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) di daerah Aceh Timur; dan kemudian diangkat pula menjadi komisaris pengurus besar partai itu untuk daerah Aceh dan Sumatera Timur. Dalam tahun 1927 tokoh Karim termasuk salah seorang yang ditangkap di Langsa dan dibuang ke Irian Barat. Bersama dengan penangkapan itu, sekolah *Normaal School* Langsa yang baru dibuka beberapa tahun ditutup kembali, karena disinyalir banyak guru-gurunya terlibat dalam gerakan menentang Belanda dan sekolah itu digunakan sebagai pusat kegiatan mereka (gedungnya permanen, terdiri dari 4 ruang belajar ditambah dengan asrama dan rumah kepala sekolah).



Dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain yang datangnya dari Jawa, Muhammadiyah merupakan organisasi yang relatif dapat hidup subur di Aceh. Orang-orang Aceh, yang jumlahnya terbatas sebab pendukung organisasi ini kebanyakan berasal dari Sumatera Barat, menyalurkan aspirasi-aspirasi politik dan sosialnya melalui organisasi Muhammadiyah ini. Itulah sebabnya mengapa berlainan dengan Muhammadiyah di Jawa yang menitikberatkan kegiatannya pada bidang keagamaan dan sosial. Muhammadiyah di Aceh di samping yang tersebut di atas, juga turut dalam gerakan politik. Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda melarang Muhammadiyah membentuk cabang-cabangnya di wilayah Aceh Barat dan Selatan yang terkenal rawan itu. Sehubungan dengan ini pada bulan Oktober 1928 telah datang seorang propagandis Muhammadiyah, Mohammad Zein Jambek, ke Tapak Tuan dan dengan tegas pemerintah setempat melarangnya untuk membentuk cabang Muhammadiyah di sana, walaupun anggota pendukung organisasi ini cukup banyak. Banyaknya anggota pendukung Muhammadiyah di sana tidak mengherankan, karena jauh sebelumnya di pesisir Barat Selatan telah berdiri perguruan Sumatera Thawalib dan juga gerakan Ahmadiyah. Guru-guru dari Sumatera Thawalib kebanyakan berasal dari Sumatera Barat juga. Dalam perjuangan bersenjata yang meletus sekitar tahun 1925-1927 di sini, di duga keras oleh pemerintah Belanda secara rahasia anggota-anggota dari ke dua organisasi ini turut berperanan; karenanya kegiatan ke dua organisasi ini pada waktu itu dilarang dan kalau didirikan cabang Muhammadiyah berarti kemungkinan besar, akan menghidupkan kembali kenangan lama.

Muhammadiyah pada mulanya masuk ke Kutaraja pada tahun 1923, dibawa oleh bekas sekretaris Muhammadiyah cabang Betawi, S. Djaja Soekarta, yang pindah ke Kutaraja dan bekerja pada *Atjeh Tram*. Tetapi pada waktu itu belum dimungkinkan untuk mendirikan sebuah cabang di sana, berhubung personalianya belum mencukupi. Baru pada tahun 1927, dengan bimbingan A. R. Sutan Mansur utusan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, berdirilah cabang Muhammadiyah di Kutaraja di bawah pimpinan R.O. Armadinata, dokter gigi. Organisasi ini kemudian mendirikan cabang-cabangnya di Sigli, Lhok Seumawe, Langsa, Kuala

Simpang dan lain-lain. Sebagai konsul pertama diangkat Teuku Muhammad Hasan dari Glumpang Payong dan kemudian digantikan oleh T. Tjut Hasan, anggota keluarga *Uleebalang* Meuraksa.

Tampaknya Muhammadiyah cabang Kutaraja segera dapat mengembangkan usaha-usahanya tanpa ada rintangan dari pemerintah Belanda. Dalam tahun berikutnya (1928) telah berhasil mendirikan sebuah badan otonomnya, yaitu Aisyiah, sebuah H.I.S. Muhammadiyah dan kependuan Muhammadiyah: "Hizbul Wathan". H.I.S. Muhammadiyah sejak didirikan (9 Juli 1928) telah mempunyai guru 3 orang, yaitu: Syamsuddin dari Sumatera Barat, Sadi Tarchoran dari Tapanuli dan Ridwan Hajir dari Yogyakarta sedang muridnya lebih dari 90 orang dengan lebih kurang 27 % anak Aceh. Kependuan *Hizbul Wathan* dibina oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari Muchtar (Guru HIS. Pemerintah) dan Sadi Tarchoran masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua, sekretaris adalah Zakaria (Guru HIS Pemerintah) dan beberapa komisaris, antara lain Teuku Tjut Hasan, Abdulhaq dan Aphan Daulat.

Suatu peristiwa yang penting yang dipelopori oleh anggota pengurus Muhammadiyah ialah diadakan rapat umum pada tanggal 27 Maret 1928; dalam rapat umum tersebut digembleng rakyat agar menyokong usul kelebihan anggota bumiputera yang duduk dalam *Volksraad*. Sebagai ketua rapat ialah Teuku Hasan Glumpang Payong dengan dibantu oleh Ridwan Hajir dan M. Jailani (Jaksa Kepala pada Pengadilan Negeri Kutaraja). Turut berpidato Teuku Nyak Arif yang waktu itu sebagai anggota *Volksraad*. Dalam rapat diputuskan juga untuk mengirim utusan khusus ke negeri Belanda, sedang biaya untuk itu akan diadakan pertandingan sepak bola di Kutaraja dan kelebihan dari biaya ini akan digunakan untuk HIS. Muhammadiyah.

Di kota Sigli Muhammadiyah didirikan pada bulan Juli 1927 dengan anggota pada mulanya sebanyak 97 orang. Kemudian menyusul organisasi wanitanya Aisyiah dengan anggota 100 orang dan kependuan *Hizbul Wathan* yang dipimpin oleh 2 orang guru HIS. dari Pemerintah dengan anggotanya 40 orang pemuda dan 4 wanita. Sedang cabang Muhammadiyah Lhok Seumawe mendapat dukungan sepenuhnya dari

Sri Maharaja *Uleebalang* Lhok Seumawe dan *Jamiah Al-Islam Wal Irsyad Al-Arabia*, suatu perkumpulan yang bergerak di bidang pendidikan pimpinan seorang Arab Syekh Muhammad Ibnu Salim Al-Kalaly yang juga mendapat dukungan dari *Uleebalang* Lhik Seumawe. Haluan perkumpulan ini sama dengan Muhammadiyah, kalau tidak dikatakan lebih radikal. Karena itulah Muhammadiyah dapat tumbuh subur di sini. Pada tanggal 23 Nopember 1928 cabang Aisyiah Lhok Seumawe didirikan yang segera disusul dengan seruan kepada anggota-anggotanya agar : 1. Taat melaksanakan kaidah-kaidah agama Islam; 2. Tidak melakukan hal-hal dilarang oleh agama; 3. Memberi pendidikan agama kepada anak-anak. *Hizbul Wathan* di Lhok Seumawe bahkan dimasuki oleh orang dewasa sebanyak 37 orang dan hanya 20 orang anak-anak.

Pendirian cabang-cabang Muhammadiyah dalam tahun 1928 semakin bertambah; di Kuala Simpang (Aceh Timur) pada tanggal 7 Oktober 1928, yang dilengkapi juga dengan cabang Aisyiah, *Hizbul Wathan*, sekolah Diniyah dan Juniah masing-masing dengan murid 47 pria, 45 wanita dan 134 orang termasuk di dalamnya 34 wanita; di Langsa tanggal 29 Oktober 1928 dan di Takengon Aceh Tengah juga dengan *Hizbul Wathan* yang baru didirikan pada bulan Mei 1929. Perlu juga dikemukakan sebagai akibat didirikan Muhammadiyah di Aceh Timur timbul reaksi dari pemimpin-pemimpin keagamaan di sana yang tidak menyetujui cara-cara yang dibawakan oleh Muhammadiyah. Mereka ini mendirikan organisasi tandingan, yaitu Siraju'ddin atau Pelita Agama di Langsa dan *Ahlusunnah Wal Jamaah* di Idi. Organisasi yang disebut terakhir beranggota pada waktu didirikan sebanyak 160 orang dan di dukung oleh *Uleebalang* setempat, karena itu cabang Muhammadiyah tidak dapat didirikan di sana. Kedua organisasi ini juga bertujuan untuk mendirikan sekolah-sekolah atau Madrasah Islam. Misalnya di Idi berdiri MADNI (Madrasah Nahdlatul Islam) di bawah pimpinan Said Husein.

Selain dari Muhammadiyah dan beberapa perkumpulan yang telah disebutkan di atas, juga para pemimpin keagamaan dan *Uleebalang* di Aceh banyak yang berminat untuk membangun sekolah-sekolah/madrasah di daerahnya. Pertama-tama yang patut disebutkan dan dapat

dianggap sebagai pelopor pembaharuan sistem pendidikan Islam di Aceh, ialah Tuanku Raja Keumala seorang ulama keturunan sultan yang seluruh masa mudanya telah dihabiskan sampai tahun 1903 berperang dengan Belanda. Pada tanggal 22 Oktober 1915 Tuanku Raja Keumala mengajukan permohonan izin kepada Gubernur Swart untuk mendirikan Madrasah *Al-Khairiyah* di Kutaraja. Permohonan tersebut disetujui oleh Swart yang disampaikan melalui suratnya tertanggal 6 Nopember 1915, no. 979/15 dengan ketentuan selalu mematuhi ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam stbl. th. 1905, no. 550 (ordonansi guru tentang pengawasan pengajaran agama Islam di Jawa dan Madura kecuali untuk daerah Surakarta dan Yogyakarta telah dikenakan juga oleh Swart untuk daerah Aceh). Atas dasar surat izin ini pada awal tahun 1916 Madrasah *Al-Khairiyah* diresmikan dengan mengambil tempat belakang Mesjid Raya Baiturrahman Kutaraja di bawah pimpinan Teungku Syekh Muhammad Saman Siron. Pada dasarnya Madrasah ini belum menunjukkan perubahan kurikulum yang berarti, selain dari cara belajar yang telah menggunakan sistem klasikal, sedang mata pelajaran sama dengan yang diajarkan di *dayah* (belum ada mata pelajaran umum). Namun sebagai langkah pertama, besar artinya bagi pertumbuhan gerakan pembaharuan sistem pendidikan Islam di masa mendatang.

Langkah Tuanku Raja Keumala tidak segera dapat diikuti oleh para pemimpin lain, terutama karena ketatnya pengawasan pemerintah. Keadaan baru berubah setelah keluarnya stbl. th. 1925, no. 219 yang memperluas daerah berlakunya, termasuk Aceh, dan kewajiban hanya sekedar memberitahu saja bagi pendirian sekolah-sekolah Islam. Selain itu juga dorongan yang datang dari Ayah Hamid Samalanga di Mekkah sebagaimana telah disebutkan terdahulu di muka. Karena dorongan ini pula Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap bersama T. H. Chiek Muhammad Johan Alamsyah, *Uleebalang* Peusangan (Aceh Utara) pada tanggal 14 Nopember 1929 telah mendirikan organisasi *Al-Muslim* di Matang Glumpang Dua. Organisasi ini pada tanggal 13 April 1930 berhasil membangun Madrasah *Al-Muslim* pertama di kota itu dengan kurikulumnya ditambah dengan mata pelajaran umum. Madrasah ini juga mendirikan organisasi kepanduannya yang diberi nama *Kasshafatul-*

*Muslim* (KAMUS). Kemudian Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku H. Abdullah Ujong Rimba mengikuti langkah ini dengan mendirikan organisasi *Jami'atu'd Diniyah* di Sigli yang segera dapat membangun Madrasah *Sa'adah Adabiyah*, mula-mula mengambil tempat di pekan Pidie, kemudian pindah ke Blang Paseh Sigli yang mendapat dukungan dari T. Bintara Pineung, *Uleebalang* Pineung. Para siswa dari madrasah ini juga giat dalam kependuan yang diberi nama R.I.B. (Rakyat Indonesia Baru). Pada masa mendatang ke dua organisasi dan madrasah yang didirikan di Peusangan dan Pidie itu besar peranannya dalam mencetak kader-kader pemimpin di Aceh dan telah memberi dorongan bagi tumbuhnya madrasah/sekolah-sekolah Islam moderen di seluruh Aceh pada tahun tiga puluhan.

Pada tahun 1929 di Peureulak berdiri sebuah organisasi pendidikan yang diberi nama *School Vereeniging PUSAKA* (Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan Anak). Tujuannya ialah untuk mendirikan sebuah sekolah rendah berbahasa Belanda (HIS) di kota Peureulak. Pengurusnya tersusun sebagai berikut : Pelindung, T. Chiek Mohammad Tayeb, *Uleebalang* Peureulak, Penasehat, T. Cut Ahmad, Ketua T.M. Nurdin, penulis, H.M. Zainuddin, Bendahara, Muhammad Hasyim, serta komisariss-komisariss T.M. Hasan, T. Itam Osman, T. Sabi dan Muhammad Syam.

Untuk lebih menggairahkan anak-anak Aceh melanjutkan sekolah serta membantu mereka yang tidak mampu, tetapi otaknya cerdas, pada tahun 1928 di Kutaraja didirikan Dana Pelajar Aceh (*Atjehsche Studiefonds*). Badan ini pada tahun 1929 dengan Surat Keputusan Pemerintah Pusat, tanggal 1 Februari 1929, no. 25 telah memperoleh hak sebagai badan hukum. Adapun susunan pengurusnya terdiri dari : Tuanku Mahmud dan T. Hasan Dik. sebagai Ketua dan Wakil Ketua, Bendahara, H.M. Bintang, serta komisariss-komisariss T. Nyak Arif, Tuanku Djamil, Abidin dan T.A. Salam. Anggotanya meliputi para *Uleebalang*, guru-guru dan pedagang, yang pada mula dibentuk telah berjumlah 137 orang. Kepada tiap anggota dipungut uang muka f 2,50. serta uang iuran antara f. 0,50 sampai f. 10,- tiap bulan. Di samping itu

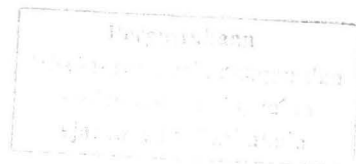
pada bulan Agustus 1928 di Kutaraja, dalam usaha mencari dana tambahan, telah diadakan pasar malam dengan memperoleh hasil sebanyak 4.000 gulden.

- Dalam rangka memajukan seni-budaya di daerah Aceh pada tahun 1908 di Ulee Lheue didirikan organisasi musik yang diberi nama *Atjeh Band*. Sebagai sponsor dan pengawasnya ialah Teuku Teungoh *Uleebalang* Meuraksa; untuk mengajar ditunjuk seorang Indo Jerman yang bernama ABC. Theveunet dan sebagai ketua korps pemain, ialah Teuku Husein Trumon, bekas siswa sekolah Raja Bukit Tinggi. *Atjeh Band* ini mendapat sambutan baik dari masyarakat Aceh; dalam tahun 1909 ikut bermain di pasar malam yang dilangsungkan di Kutaraja dengan didampingi oleh korps musik militer dan dalam tahun 1919 ikut berperanan dalam pekan kebudayaan yang diselenggarakan oleh Sarikat Atjeh (*Atjeh Vereeniging*) di Kutaraja. Langkah *Atjeh Band* diikuti pula oleh daerah-daerah lain dalam tahun-tahun berikutnya, seperti di Peureulak pada tahun 1930 munculnya *Jolly Night Band* serta Tugep (*Tuneel Gezelschap* Peureulak) dan di Jeunieb (Aceh Utara) tahun 1937 didirikan *Liliput Band* di bawah asuhan Teuku Ahmad, *Uleebalang* Cut Jeunieb.

Adapun kehidupan pers di daerah Aceh diawali dengan terbitnya surat kabar *Sinar Atjeh* pada awal tahun 1908 di Kutaraja. Harian ini banyak sumbangannya bagi kemajuan masyarakat Aceh. Dalam salah satu terbitannya dinyatakan :

... asal sekarang (1908) biarlah pemerintah membuat aturan yang lebih keras, buat tarik anak-anak itu masuk sekolah; hingga mereka sendiri akan memaksa sanak saudaranya bersekolah; masa itu, aturan yang keras itu, tidak perlu dijalankan lagi.

Dalam pemberitaannya yang lain T. Teungoh, putra *Uleebalang* Meuraksa ketika mengunjungi Sekolah Raja di Bukit Tinggi pada awal 1908, menyatakan :



Saya menyesal sekali sebab ayah saya tidak mengirimkan saya kemari, tetapi yang terlebih salah yaitu perempuan bangsa Aceh. Ibu-ibu itu tiada suka bercerai dengan anaknya buat pergi kelain negeri oleh sebab itu kami orang tinggal bodoh.

Di Langsa Aceh Timur, oleh Abdul Karim Ms yang telah disebutkan terdahulu, sebelum pembuangannya ke Irian Jaya pernah menerbitkan surat kabar *Soeara Rakjat* ; tetapi tidak dapat bertahan lama karena berbagai kesulitan dalam penerbitan dan hambatan-hambatan yang datang dari pemerintah Belanda. Sumbangannya yang lebih berarti adalah sebagai pengasuh: “Rubrik Atjeh: dalam harian “*Sinar Deli*” yang terbit di Medan. Selain itu, setelah kembali dari pembuangan, pada tahun 1936 ia menerbitkan buku sejarah kepahlawanan : “Teuku Oemar Djohan Pahlawan, Panglima Perang Besar di tanah Atjeh. Buku ini penting artinya sebagai buku pertama untuk mengenal seorang pahlawan Aceh yang dengan gigih mempertahankan tanah airnya dan diterbitkan dalam masa penjajahan pula, suatu tindakan yang dapat dikatakan berani pada waktu itu. Kehidupan pers di Aceh tampaknya menjadi lebih subur setelah tahun tigapuluhan. Hal ini dapat ditandai dengan diterbitkan majalah-majalah, seperti : Pergaoelan, Soeara Atjeh di Kutaraja, masing-masing di bawah pimpinan Amiruddin Pokon dan T. M. Usman, majalah resmi PUSA, “Penyoeloh” di Bireun, dan lain-lain.

Sehubungan dengan adanya kegiatan pergerakan serikat sekerja di Aceh selama tahun 1928/1929, seperti yang disebutkan dalam laporan keadaan politik dari Gubernur Aceh dan Takluknya adalah : di Aceh Besar/Kutaraja terdapat perkumpulan untuk pegawai-pegawai jawatan kereta api yang diberi nama : *Perkumpulan Beambten Spoor en Tramwegen* (PBST) dan *Perkumpulan Guru-guru Aceh* (PGGA).

Di Sigli telah didirikan perkumpulan dari pemilik-pemilik auto, pengusaha-pengusaha dan supir-supir auto dengan nama: *Outosport-Vereeniging*; tetapi organisasi ini lebih dikenal, mungkin karena anggota dan pengaruh supir lebih besar, dengan sebutan : *Perkumpulan Supir*. Persatuan Motorist Indonesia (PMI) yang berpusat di Medan sudah dipastikan untuk didirikan di Kuala Simpang. Tetapi rupanya organisasi ini tidak dapat berkembang di sana.

Sejak *Volksraad* (Dewan Rakyat) dibentuk 16 Desember 1916 telah diangkat sejumlah anggota. Untuk jabatan yang mewakili Aceh ditunjuk seorang tokoh ternama, bernama Teuku Chiek Muhammad Thayeb, *Uleebalang* kenegerian Peureulak wilayah Langsa, bahagian Aceh Timur. Daerah ini kaya dengan minyak, Teuku Chiek Muhammad Thayeb seorang terpelajar yang bersekolah di Bandung. Sebelum diangkat menjadi *Uleebalang* pada tahun 1913, yang bersangkutan sudah memasuki dunia pergerakan Indonesia. Teuku Chiek Muhammad Thayeb sudah mengenal dan bergaul rapat dengan tokoh-tokoh kebangsaan di Jawa pada masa itu, seperti misalnya dengan Iwan Kusuma Sumantri dan karenanya figur Teuku Chiek Muhammad Thayeb sebagai putera bangsa Indonesia di Dewan Rakyat menjadi lebih menonjol lagi.

Perlu dicatat di sini, bahwa pada waktu Dr. C. Snouck Hurgronje hendak bercuti ke negeri Belanda, dalam suratnya mengenai perlunya dilanjutkan pengawasan terhadap pemuda-pemuda Indonesia yang sedang belajar di Jawa, selaku penasihat pemerintah Hindia Belanda di bidang kebumiputeraan ia telah memperingatkan supaya pemerintah Hindia Belanda tetap waspada terhadap pemuda Teuku Muhammad Thayeb tersebut. Karenanya tidaklah mengherankan jika tindakan dan sikap anggota Dewan Rakyat daerah tersebut telah sangat menjengkelkan pemerintah Hindia Belanda di Dewan Rakyat. Usul-usul Teuku Chiek Muhammad Thayeb bernada keras, juga terdengar sinis; dan selalu menentang pemerintah Hindia Belanda. Bahkan selama di Jawa, ia telah menjadikan rumah kediamannya di Batavia sebagai pusat intelektual bagi pemuda-pemuda Aceh yang sedang belajar di sana. Karenanya terpaksa pemerintah tidak menghabiskan masa jabatan beliau selama 4 tahun itu seperti yang berlaku bagi setiap anggota Dewan Rakyat yang diangkat. Teuku Chiek Muhammad Thayeb, hanya dua tahun saja dibenarkan menjadi anggota Dewan Rakyat (1918-1920). Setelah berhenti sebagai anggota Dewan Rakyat, pemerintah tidak pula segera mengangkat anggota lain sebagai penggantinya. Lowongan itu terbuka sampai tujuh tahun lamanya.

Barulah pada tahun 1927 pemerintah mengangkat seorang anggota baru untuk Dewan Rakyat. Untuk itu pemerintah memilih seorang tokoh



lain yang tidak kurang 'kerasnya' dari anggota sebelumnya, yakni Teuku Nyak Arief, Panglima *Sagi XXVI* Mukim, salah sebuah *Sagi* dalam daerah Aceh Besar, seorang alumnus OSVIA. Pilihan pemerintah yang inipun membuat pemerintah Hindia Belanda sendiri menjadi kewalahan.

Perasaan kebangsaan Indonesia yang semakin meluap-luap menjelang lahirnya 'Sumpah Pemuda' pada bulan Oktober 1928 telah mendorong Teuku Nyak Arief pada tanggal *18 Juni 1928* mengucapkan pidatonya di Dewan Rakyat seperti biasanya dengan semangat yang berapi-api.

Teuku Nyak Arief telah berpidato dengan perasaan yang penuh keharuan dan kecintaan tanah air dan mengumandangkan kata dan pengertian Indonesia serta menekankan, bahwa kesatuan nasional merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sedangkan syarat untuk itu demikian kata Teuku Nyak Arief sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia, tegasnya: Indonesia sudah harus segera merdeka dari penjajahan Belanda.

Selain kepentingan rakyat di daerah Aceh, di Dewan Rakyat Teuku Nyak Arief turut juga memperjuangkan bidang pendidikan nasional yang mencakup usul-usul pemberian kesempatan yang luas kepada rakyat Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Di samping itu juga mengenai perbaikan gaji guru serta peningkatan mutu guru di Indonesia dengan tidak melewatkan kecaman-kecaman pedas terhadap politik pemerintah di bidang perekonomian dan perpajakan yang mencekik kehidupan rakyat yang memang sudah hidup melarat itu.

Dalam salah satu usaha menuju persatuan bangsa Indonesia, dalam salah satu sidang Dewan Rakyat Teuku Nyak Arief telah menolak kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang hendak menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan sebaliknya beliau mengusulkan dipergunakan bahasa Melayu.

Detik perjuangan beliau selama masa jabatan sebagai anggota dewan rakyat yang sangat menonjol ialah turut sertanya beliau dalam

pembentukan Fraksi Nasional di Dewan Rakyat yang terbentuk pada tanggal 27 Januari 1930 bersama-sama Suangkupon, R. P. Suroso, Dwiji Sewoyo, Mukhtar, Datuk Kayo, Sutadi dan Pangeran Ali yang bertujuan mencapai Indonesia Merdeka dalam waktu secepat mungkin.

Dalam membela kepentingan-kepentingan rakyat tidak jarang pula terjadi perdebatan-perdebatan sengit antara Teuku Nyak Arief dengan anggota-anggota bangsa Belanda dalam sidang-sidang Dewan Rakyat. Sebagai catatan perlu dinyatakan di sini tentang perdebatan beliau dengan anggota Mr. Fruin, sekretaris '*Deli Plantervereniging*', dari *Politiek Economische Bond* (didirikan pada bulan Januari 1919) yang kemudian hijrah ke *Vaderlandsche Club* yang membela kepentingan perkebunan Belanda begitu gigih, sampai-sampai Teuku Nyak Arief di Dewan Rakyat digelari "rencong Aceh" yang siap sedia dan kapan saja menikam lawan-lawan tanpa kenal ampun. Dalam aksi '*inlandsche meerderheid*' (kelebihan jumlah anggota pribumi) dalam Dewan Rakyat yang diadakan di daerah Aceh, Teuku Nyak Arief pun tidak tinggal diam.

Sebagai pengganti Teuku Nyak Arief, pemerintah Hindia Belanda telah mengangkat seorang keturunan sultan Aceh, bernama Tuanku Mahmud, *hoofd ambtenaar ter beschikking* (pegawai tinggi diperbantukan pada mula-mula kantor Gubernur, kemudian Residen Aceh) seorang lulusan *Bestuurs School* (sekolah pemerintahan) di Jakarta.

Pada mulanya Dewan Hindia mengusulkan dua orang calon untuk anggota Dewan Rakyat yang berasal dari daerah Aceh, yaitu Tuanku Mahmud dan Teuku Chiek Johan Alamsyah, *Uleebalang* kenegerian peusangan dalam wilayah Bireun (Aceh Utara), akan tetapi akhirnya pemerintah telah mengangkat Tuanku Mahmud. Pengangkatan itu terjadi dengan surat keputusan pemerintah Hindia Belanda bertanggal 15 Mei 1931 no. 1 dan berlaku terhitung mulai 15 Juli 1931.

Masa jabatan Tuanku Mahmud berakhir pada tahun 1935. Akan tetapi, dengan keputusan pemerintah Hindia Belanda bertanggal 4 Mei 1935 No. 1 x Tuanku Mahmud diangkat lagi untuk masa jabatan selanjutnya selama 4 tahun sampai dengan tahun 1939, bahkan setelah

itu telah diangkat kembali sampai menjelang berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia pada bulan Maret 1942.

Berbeda dengan anggota-anggota Dewan Rakyat daerah Aceh yang telah diangkat sebelumnya, Tuanku Mahmud tergolong seorang tokoh yang sangat moderat dalam Dewan Rakyat. Ia menjadi anggota Perhimpunan Pegawai *Bestuur* Bumi Putera yang didirikan pada tahun 1929, sebuah perkumpulan yang oleh pihak Belanda dianggap juga '*Links-Midden*' (kiri tengah). Dengan kepribadiannya yang disebut '*wellevend en beschaft*' (sopan dan beradab, suka menenggang) Tuanku Mahmud dikatakan sudah berhasil menarik perhatian banyak teman-teman seprofesi dalam Dewan Rakyat ataupun masyarakat biasa, baik orang Belanda maupun orang Indonesia mengenai cara ia memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat di daerah Aceh.

Tak lama setelah Tuanku Mahmud diangkat sebagai anggota Dewan Rakyat, lahirlah "Petisi Sutarjo" yang menghendaki kemerdekaan bangsa Indonesia. Di Dewan Rakyat terjadi perdebatan-perdebatan sengit sehubungan dengan petisi itu. Pada waktu diadakan pemungutan suara ternyata 26 orang menyokong petisi itu (7 IEV, 6 nasionalis, 3 PEB, 1 tidak berpartai dan 9 orang yang telah turut menandatangani petisi), sedang 20 orang menolaknya (3 VC, 3 CSP, 1 *middenstand*, 2 *Economische groep*, 1 militer, 2 IKP, 1 tidak berpartai, 4 nasionalis, 1 IEV dan 1 ketua). Anggota Tuanku Mahmud tidak turut memberi suara. Akan tetapi terlepas dari semua itu, nasib "Petisi Sutarjo" akhirnya menemui kegagalan juga karena ditolak oleh pemerintah Belanda di Den Haag, yang menganggap, bahwa bangsa Indonesia belum lagi matang untuk diberikan kemerdekaan.

Dalam usaha menghapuskan pemerintahan militer dalam wilayah-wilayah di daerah Aceh, Tuanku Mahmud selalu menyampaikan usul beliau. Barulah dalam periode 1938-1940 dari enam buah wilayah yang diperintah oleh komandan-komandan tentara, lima buah akhirnya diperintah oleh pamong Belanda. Tuanku Mahmud memahami, bahwa dalam wilayah-wilayah demikian pastilah digunakan cara-cara kekerasan terhadap rakyat oleh pihak tentara Belanda.

Di bidang pemerintahan adat yang dilaksanakan oleh para *Uleebalang* berdasarkan '*korte verklaring*', Tuanku Mahmud memahami, bahwa di kalangan pemuda-pemuda *Uleebalang* telah timbul hasrat untuk hidup dalam alam demokrasi. Ia memahami, bahwa struktur pemerintahan adat semakin lama semakin terasa ketinggalan zaman. Karenanya Tuanku Mahmud mengusulkan dalam Dewan Rakyat, agar pemerintah Hindia Belanda berusaha ke arah itu. Akan tetapi betapapun besar artinya apa yang diusulkan itu, namun pemerintah tetap menganggap usul seperti itu belum tiba masanya untuk dipertimbangkan.

Ketika mendekati masa berakhirnya peran pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 1940 negeri Belanda di duduki Nazi Jerman. Ratu Belanda Wilhelmina beserta keluarga yang diikuti oleh pemerintah pusat Belanda pindah ke London. Selain itu ketegangan-ketegangan akibat perang Jepang di Cina yang sudah berlangsung sekian lama dan terus menerus adanya rongrongan dari pihak nasionalis anggota bangsa Indonesia di Dewan Rakyat membuat pemerintah Hindia Belanda semakin terjepit.

Jika di atas telah disinggung tentang tidak turut sertanya Tuanku Mahmud memberi suara kepada 'petisi Sutarjo', maka pergolakan politik pada masa-masa belakangan telah membuat ia melihat lain terhadap nasib dan kepentingan tanah air Indonesia. Hal ini ditandai pada waktu diumumkannya 'Atlantic Charter' oleh Presiden Amerika Serikat Roosevelt bersama Perdana Menteri Inggris Churchill yang menyatakan, bahwa, jika Perang Dunia II yang sudah dimulai di Eropah sejak tahun 1939 telah usai, maka semua bangsa yang selama ini terjajah akan diberikan kemerdekaan.

Pada tanggal 23 Agustus 1941, 28 orang anggota Dewan Rakyat, termasuk Tuanku Mahmud, menyampaikan pertanyaan kepada pemerintah Hindia Belanda, apakah pemerintah menyetujui maksud 'Atlantic Charter' beserta keterangan Wakil Perdana Menteri Inggris Mayor Atlee, bahwa 'dasar-dasar Atlantic Charter' itu dimaksudkan untuk seluruh bangsa yang ada di dunia baik yang berwarna maupun yang berkulit putih, jika ya, bagaimanakah konsekwensi-konsekwensinya bagi

bangsa Indonesia untuk masa-masa mendatang.

Jawaban pemerintah oleh para penanya diharapkan dapat diperoleh dalam sidang yang sedang berjalan. Hal ini dianggap juga karena jawaban itu sangat menentukan bagi nasib bangsa Indonesia untuk masa-masa mendatang.

Organisasi lain yang pernah berdiri di Aceh dan yang datang dari luar daerah Aceh yaitu *Jong Islamieten Bond*, sebuah organisasi Islam yang bergerak di bidang agama.

*Jong Islamieten Bond* (JIB) pada mulanya telah direncanakan untuk mendirikan sebuah cabang di Kutaraja pada 1928. Pada waktu itu (Juni 1928) seorang pengurus pusat JIB, Azis, putra seorang pensiunan *Groot Atjehsche Afdeelingsbank* yang bernama Brahim, pulang ke Kutaraja dalam rangka libur sekolahnya. Tetapi usahanya itu belum berhasil; barulah pada tahun 1930 dengan dukungan T. Nyak Arief, cabang JIB dapat didirikan di Kutaraja, Sigli dan Lhok Seumawe dengan lebih dahulu ditegaskan tidak mencampuri urusan politik di Aceh (pada dasarnya setiap organisasi Islam yang masuk ke Aceh selalu dicurigai oleh pemerintah Belanda, walaupun organisasi tersebut bergerak di bidang sosial). Cabang Kutaraja juga mendirikan bagian wanitanya JIBDA (*Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling*) dan pada tahun berikutnya (1931) berhasil membuka sebuah sekolah khusus untuk putri (sekolah rakyat putri). Tetapi dalam tahun 1932 sekolah ini diubah menjadi sekolah campuran (untuk pria dan wanita). Pada tanggal 6 Oktober 1932 JIB mendirikan lagi sebuah cabang di Sabang yang diketuai oleh Abdurrahim; dan setelah itu tampaknya JIB tidak berhasil mendirikan cabang-cabangnya di kota lain di Aceh.

Organisasi Jamiatul Wasliyah yang berasal dari Sumatera Timur berhasil mengembangkan dirinya terbatas hanya sampai ke daerah Aceh Timur saja; jadi berbeda dengan Muhammadiyah yang cabang-cabangnya tersebar di seluruh Aceh. Padahal ditinjau dari dasar organisasi, Jamiatul Wasliyah lebih dimungkinkan untuk dapat diterima oleh masyarakat Aceh, terutama masyarakat di *Gampong-Gampong*. Seperti diketahui

Muhammadiyah adalah organisasi yang dengan radikal hendak memperbaharui cara-cara berpikir masyarakat Islam, yang kadang-kadang sukar diterima oleh umumnya masyarakat Aceh, terutama prinsipnya yang berpegang pada mazhab yang empat (Syafii, Hambali, Maliki dan Hanafi). Di daerah Aceh Timur itu Jamiatul Wasliyah membina sekolah-sekolah Islam tingkat *Ibtidaiyah* (rendah), yaitu di Kuala Simpang, Alue Merbau, Langsa dan Idi.

Bersamaan dengan pendirian cabang-cabang JIB dan Jamiatul Wasliyah ada juga dua organisasi yang masing-masing berhasil mendirikan cabangnya sejauh yang diketahui hanya satu buah saja, yaitu: cabang Al-Islam Comite di Sigli dan cabang Pembela Negeri di Lhok Seumawe. Di samping itu gerakan Ahmadiyah yang berhasil mendapat pendukung di daerah pesisir Barat dan Selatan Aceh (Meulaboh dan Tapak Tuan), telah mengejutkan masyarakat Islam di daerah Aceh Besar, pesisir Utara dan Timur Aceh. Pada tanggal 8 Juli 1932 Mohammad Sadiq, seorang propagandis Ahmadiyah keturunan India, datang ke Kutaraja dari Padang. Tanggal 12 Juni ia mengadakan rapat di Taman Bacaan (pustaka) Muhammadiyah, namun di sana ia tidak mendapat sambutan, bahkan menjadi ejekan pengikut rapat. Kejadian yang serupa juga dialami di Sigli dan Lhok Seumawe. Kemudian terjadi semacam polemik dalam majalah *pergaoelan* yang terbit di Kutaraja di bawah pimpinan Aminuddin Pohan. Dalam terbitannya, no. 45 dan 46 majalah itu telah menyerang Mohammad Sadiq yang dikatakan telah mengganggu ketentraman beribadat umat Islam di Aceh. Sementara itu dalam terbitan no. 48 dan 49 dimuat pula balasan Mohammad Sadiq yang menegaskan bahwa serangan terhadapnya sama sekali tidak beralasan. Puncak dari peristiwa ini adalah terbentuknya "Panitia Anti Ahmadiyah" di Kutaraja pada tanggal 7 Agustus 1932. Adapun susunan pengurusnya ialah : Teungku Hasballah Indrapuri dan Teungku Syekh Ibrahim Lam Nga, masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua, Teungku Johan Meuraksa, kemanakan Teuku Teungoh Meuraksa sebagai sekretaris dengan anggotanya ialah Teuku Nyak Arief dan Teungku Syekh Saman. Panitia ini pada tanggal 21 Agustus telah mengadakan rapat raksasa di Kutaraja

yang dihadiri paling sedikit 2000 orang pengunjung. Madrasah-Madrasah Islam serta organisasi-organisasi Islam yang ada di Kutaraja dan sekitarnya ikut mengambil bagian. Karena adanya aksi-aksi ini maka Ahmadiyah tidak berhasil membentuk cabangnya di Kutaraja, Sigli, Lhok Seumawe dan juga Langsa; apalagi pemerintah Belanda sudah mempunyai alasan yang kuat untuk tidak memberikan izin pembentukannya.

Perguruan nasional Taman Siswa didirikan di Kutaraja tanggal 11 Juli 1932. Pendirian cabangnya di sini diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat Aceh sendiri dengan mendapat dukungan dari beberapa orang terpelajar yang berasal dari luar daerah. Untuk ini jauh sebelumnya telah dibentuk panitia pendirinya yang terdiri dari : Teuku Hasan Glumpang Payong (T. Hasan Dik) sebagai ketua, Teuku Nyak Arief sebagai wakil ketua, sebagai penulis ialah Pohan dari Tapanuli, sedang anggota-anggotanya A. Azis (Padang), Paman Ras Martin (Ambon) dan lain-lain. Panitia segera mengirim utusannya, T. M. Usman El Muhammady, ke Yogyakarta menemui Ki Hajar Dewantara, memohon agar Taman Siswa membuka cabangnya di Aceh. Berdasarkan permohonan tokoh-tokoh masyarakat Aceh tersebut, Majelis Luhur Taman Siswa mengirimkan tiga orang gurunya ke sana, yaitu Ki Soewondo Kartoprodjo beserta istri (yang bertugas juga sebagai guru) dan Soetikno Patmosoemarto. Dengan bermodalkan semangat dan kesadaran nasional yang tinggi ketiga tokoh Taman Siswa ini berangkat ke Aceh yang sebenarnya masih asing dan belum dikenal tentang seluk beluk masyarakat dan adat istiadatnya pada waktu itu, dan ini tidak terlepas dari usaha pemerintah kolonial Belanda, setiap orang yang masuk ke Aceh, apalagi tingkat pemimpin, pada umumnya ada kecendrungan timbul rasa takutnya. Tetapi setelah mereka tinggal di sana, apa yang ditakutkan, bahwa orang Aceh membenci setiap orang luar, ternyata tidak benar sama sekali. Berkat pembinaan yang tekun dari mereka, dalam waktu yang relatif singkat panitia telah berhasil membuka 4 buah sekolah Taman Siswa di Kutaraja, yaitu : masing-masing sebuah Taman Anak, Taman Muda, Taman Antara dan Taman Dewasa.

Sementara itu pada tanggal 12 Mei 1932 dengan mengambil tempat Kantor *Uleebalang* Kaway XVI Meulaboh telah diadakan rapat dalam

rangka pembentukan cabang Taman Siswa di sana. Rapat ini dihadiri oleh lebih kurang 150 orang dan pengambil inisiatifnya ialah *Uleebalang* sendiri : Teuku Chiek Mohd. Ali Akbar serta calon penggantinya Teuku R. Neh. Di daerah ini juga selama dua tahun (sampai tahun 1934) telah berhasil dibuka 4 buah sekolah, serupa dengan di Kutaraja, yaitu : Taman Anak, Taman Muda, Taman Antara dan Taman Dewasa.

Pada akhir bulan Juli 1932 di Sabang telah direncanakan untuk mendirikan cabang Taman Siswa; sebagai pengambil inisiatifnya ialah : Teuku Abbas, *Uleebalang* Sabang dan dr. Latumeten, yang berasal dari Ambon dan bekerja sebagai Kepala Rumah Sakit Jiwa Sabang. Pendiariannya baru dapat dilakukan dalam bulan September 1932 dan pada tahun berikutnya berhasil dibuka dua buah sekolah yaitu : Taman Anak dan Taman Muda di bawah pimpinan Soewandi dan Jakob.

Sebagai daerah terakhir yang berhasil dimasuki Taman Siswa pada waktu itu ialah Jeunib, sebuah daerah *Uleebalang Cut* yang termasuk dalam wilayah daerah *Uleebalang* Samalanga di Aceh Utara. Teuku Ahmad, adik T. Chiek Samalanga yang ditempatkan sebagai *Uleebalang Cut* di Jeunib, pada tahun 1935 mendirikan cabang Taman Siswa dan berhasil membuka dua buah sekolah di sana yaitu : Taman Anak dan Taman Muda di bawah pimpinan Moerdhani. Dalam perkembangan selanjutnya Taman Siswa Jeunib kemudian dipindahkan ke Bireun.

Selain lapangan pendidikan, Taman Siswa di Aceh juga mendirikan kependuan, koperasi dan sebuah organisasi yang diberi nama Indonesia Muda, Gerakan kependuan di Sabang diberi nama dengan "*Suryawirawan*" di bawah pimpinan Sarwono, sedang yang di Kutaraja, Meulaboh dan Jeunib/Bireun bernama "Kependuan Bangsa Indonesia" (KBI) di bawah pimpinan Moeljono (di Kutaraja). Pembentukan koperasi ada pada setiap cabang Taman Siswa dan tujuannya untuk membantu serta membina suasana kehidupan kekeluargaan sesama anggota. Organisasi Indonesia Muda dipimpin oleh Soedarmadi, tetapi organisasi ini tidak berkembang luas dalam masyarakat, apalagi setelah pimpinannya dipindahkan ke Palembang.



Dalam berbagai kebijaksanaan kegiatannya, Taman Siswa, seperti juga di daerah asalnya pulau Jawa, selalu bersikap tidak ingin bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Sikap ini mengakibatkan Taman Siswa di Aceh juga selalu diawasi gerak-geriknya. Pada tahun 1933 Taman Siswa membangkang tidak turut serta dalam memperingati perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina, karena tidak sesuai dengan prinsip Taman Siswa. Sebagai akibatnya pemerintah Belanda mengambil tindakan melarang anak-anak tentara dan pegawai di Kutaraja untuk bersekolah di Taman Siswa, sehingga muridnya menjadi berkurang pada waktu itu. Suatu peristiwa lain yang cukup mengejutkan juga adalah ketika Taman Siswa merayakan Pahlawan Pangeran Diponegoro di Kutaraja. Pada waktu itu Soewito, seorang keluarga Taman Siswa, setelah membacakan riwayat perjuangan Diponegoro, langsung ditangkap oleh pemerintah Belanda dan dipenjarakan selama enam bulan. Dalam rangka lebih mendekatkan diri dengan masyarakat Aceh yang jiwa keislamannya tebal, Taman Siswa juga memberikan pelajaran agama Islam untuk anak didiknya, dengan ketentuan sebagai mata pelajaran tambahan yang boleh diikuti atau tidak, (tetapi apabila sudah diambil wajib diikuti). Untuk gurunya diambil dari Madrasah-madrasah Islam yang pada waktu itu sudah cukup banyak tersebar di seluruh Aceh dan sebaliknya banyak juga dari guru-guru Taman Siswa yang diambil oleh Madrasah-madrasah tersebut untuk memberikan pelajaran umum, seperti berhitung, sejarah, ilmu bumi dan lain-lain.

Tumbuh dan berkembangnya Madrasah Islam yang jumlahnya semakin besar selama tahun sembilan belas tiga puluh merupakan lanjutan dari usaha pembaharuan yang telah diletakkan pada masa yang lalu. Sebagaimana telah disebutkan tokoh-tokoh pembaharu, seperti Tuanku Raja Keumala (pendiri Al-Khairiyah, 1916), Teungku Syekh Abd. Hamid Samalanga, T. Chiek Peusangan dan Tgk. Abd. Rahman Meunasah Meucap (pendiri Al-Muslim Matang Gelumpang Dua), T. Sri Maharaja Lhok Seumawe, Syekh Al-Kalaly dan Tgk. M. Hasbi Ash Shiddieqy (pembina Madrasah Al-Irsyad Lhok Seumawe), T. Chiek Idi dan Sayed Husin Syahabi (pendiri Ahlusunnah Wal Jama'ah, kemudian Madrasah Madni di Idi), Tgk. Mohd. Daud Beureueh dan Tgk. H. Abdullah Ujong

Rimba (dari Madrasah Sa'adah Adabiyah di Sigli) dan masih banyak lagi adalah besar jasanya dalam usaha pembaharuan itu. Mereka termasuk pemimpin-pemimpin yang anti Belanda dengan caranya masing-masing. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila di madrasah-madrasah yang didirikan selalu ditanamkan seperti juga yang ditegaskan oleh A.J, Piekaar - sikap anti Belanda kepada anak didiknya. Di samping itu di tiap Madrasah tersebut tidak ketinggalan pula dibentuk gerakan kepanduan, yang nanti setelah proklamasi kemerdekaan R.I. bekas anggota-anggotanya ini besar peranannya dalam mempertahankan kemerdekaan (misalnya, sebagian besar dari barisan Mujahidin dan Pesindo di Aceh terdiri dari bekas anggota kepanduan yang dibina dalam lembaga pendidikan ini).

Untuk mendapatkan gambaran bagaimana pesatnya perkembangan Madrasah-madrasah Islam itu, dapat dilihat, umpamanya pada Madrasah Al-Muslim yang berpusat di Matang Glumpang Dua. Dalam waktu cepat Madrasah ini telah berhasil mendirikan cabang-cabangnya hampir di seluruh *mukim* dalam wilayah *Landschap* Peusangan, seperti di Cot Meurak Bireun, Cot Batee, Bale Seutui, Jangka, Bugak, Krueng Baro, Uteuen Gathom, Lueng Daneun Leubu dan lain-lain. Sementara itu, dengan nama yang serupa meskipun tidak ada hubungan dengan Al-Muslim di Peusangan - di daerah pesisir Barat dan Selatan juga berdiri Madrasah Al-Muslim, yaitu di daerah Teunom (Aceh Barat), Sinabang (Aceh Barat), Susoh (Aceh Selatan), Sawang (Aceh Selatan), Lhok Bangkuang (Aceh Selatan) dan di daerah Terbangun (Aceh Selatan).

Sehubungan dengan kurikulum yang berlaku di Madrasah-madrasah tersebut, pada umumnya sebagian besar telah mencantumkan mata pelajaran umum, di samping mata pelajaran agama dalam rencana pelajarannya. Sedang sebagian lagi masih mempertimbangkan apakah pelajaran umum itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Untuk membahas masalah ini pada tanggal 1-2 Oktober 1936 diadakan Musyawarah Pendidikan Islam Aceh di Kutaraja dan Lubuk (rapat-rapat tertutup diadakan di Kutaraja, rapat umum di Lubuk, lebih kurang 10 km dari Kutaraja). Musyawarah dihadiri oleh para *Uleebalang*

dan ulama, a. l. T. Muhammad Ali dari *Sagi XXII* Mukim, T. Pakeh-Mahmud dari XII Mukim Pidie, T. Manyak Baet, T. Djohan Meuraksa, Tgk. Abd. Wahab Seulimeum, Tgk. Hasballah Indrapuri, Tgk. Hasbi Ash Siddieqy, Tgk. Mohd. Daud Beureueh dan masih banyak lagi. Sebagai hasil musyawarah telah diputuskan sebagai berikut :

- a. “Tiada sekali-kali terlarang dalam agama Islam, kita mempelajari ilmu ke-duniaan yang tiada berlawanan dengan syari’at, malah wajib dan tidak layak ditinggalkan buat mempelajarinya.
- b. Memasukkan pelajaran-pelajaran umum itu ke dalam sekolah-sekolah agama memang menjadi hajat sekolah-sekolah itu.
- c. Orang perempuan berguru kepada orang laki-laki itu tidak ada halangan dan tidak tercegah oleh syarak.

Dalam pada itu sampai Oktober 1936 telah terdaftar tidak kurang dari 94 Madrasah tersebar di seluruh daerah Aceh dan masih ada lagi yang belum terdaftar. Rupanya Stbl. thn 1925, no. 219 telah memberikan kesempatan yang luas bagi tumbuhnya Madrasah-madrasah Islam di Aceh, terutama di daerah-daerah yang berpemerintahan sendiri (*Zelfbesturende Landschappen*) yang dikecualikan dari *Staatblad* tersebut. Dalam wilayah ini Madrasah Islam selalu mendapat perlindungan dari *Uleebalangnya*, bahkan, seperti telah dikemukakan di atas, banyak *Uleebalang* yang turut mengambil bagian, sehingga pemerintah Belanda sukar sekali untuk mengawasi secara langsung madrasah-madrasah tersebut yang sebenarnya cukup berbahaya bagi Belanda, karena di sinilah tempatnya bersemi propaganda anti Belanda.

Dalam tahun-tahun berikutnya banyak lagi madrasah Islam yang didirikan. Di antaranya ialah : *Dunia Akhirat Middelbare school* (DAMS) di Sigli, didirikan pada tahun 1938 dengan diprakarsai oleh T. Pakeh Mahmud dari XII Mukim Pidie dan T. M. Amin. Madrasah ini mempunyai dua tingkat, yaitu : *Onderbouw* dan *Bovenbouw*. Yang pertama lama belajar dua tahun, dibagi menjadi dua bagian : bagian A untuk anak-anak yang berasal dari HIS, *Inlandsche School* dan *Vervolgschool* dengan pendidikannya dititikberatkan pada pelajaran agama, sedang bagian B

untuk anak-anak dari madrasah Islam dengan titikberatnya pada pelajaran umum, seperti bahasa Belanda, Sejarah, Berhitung dan lain-lain. Tingkat *Bovenbouw* lama belajar 4 tahun dan bagi yang berminat ditambah dengan kursus guru satu tahun, susunan mata pelajarannya hampir 50% umum dan 50% agama (dari 27 mata pelajaran, terdiri dari 13 agama dan 14 umum). Selain itu, madrasah yang khusus mendidik guru didirikan juga di Lampaku, yang diberi nama : *Ma'had Imanul Mukhlis (MIM)*. MIM Lampaku ini didirikan oleh T. Panglima Polem M. Daud (Panglima Sagi XXII Mukim) bersama puteranya T. M. Ali pada tahun 1940; untuk pimpinannya khusus didatangkan dari Minangkabau, yaitu : H. Ilyas Muhammad Ali Al-Azhary, sedang guru-guru yang turut menyumbangkan tenaganya di sini a.l. Tgk. M. Hasbi Ash Siddieqy, Mr. S. M. Amin dan Soetikno Padmosoemarto dari Taman Siswa.

Meskipun perkembangan pergerakan-pergerakan kebangsaan di Aceh tidak seperti di Jawa, yang mana di Aceh lebih bercorak keagamaan dari pada politis, namun cukup mempengaruhi pihak Belanda untuk bertindak hati-hati dan tegas. Seperti halnya di Jawa, di Acehpun Belanda juga menangkap tokoh-tokoh gerakan Komunis yang mereka anggap ekstrim dan berbahaya. Di antara mereka yang pada mulanya diasingkan ke tanah Merah Irian adalah, Cut Din anak seorang khadi *musapat* di Meulaboh Aceh Barat. Ia dituduh oleh Belanda melakukan propaganda komunis dan berdasarkan surat keputusan pemerintah Hindia Belanda tanggal 5 Pebruari 1929 dituntut 2 tahun 8 bulan penjara. Abdul Karim Bin Muhammad Sutan bekas komisaris pengurus besar Partai Komunis Indonesia untuk Aceh dan Sumatera Timur, berdasarkan surat keputusan pemerintah Hindia Belanda tanggal 14 Mei 1927 juga diasingkan ke Tanah Merah Irian.

Tokoh-tokoh gerakan komunis lainnya yang ditangkap oleh Belanda karena tuduhan ikut terlibat menyebarkan ajaran komunis di Aceh antara lain adalah, Teuku Muhammad Ali Basyah bekas *Uleebalang* Matang Kuli Kecamatan Lhok Sukon. Ia dituntut 5 tahun 4 bulan penjara, tetapi kemudian dengan surat keputusan pemerintah Hindia Belanda tanggal 11 Desember 1931 no. 19 juga diinternir ke Tanah Merah

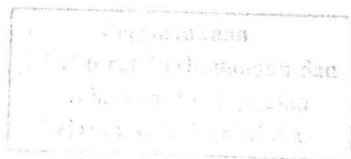
Irian. Muhammad Hanafiah bekas pimpinan Partai Komunis Indonesia di Bireun dan Samalanga dituntut selama 6 tahun penjara, kemudian dengan surat keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 3 Juli 1931 no. 11, ia juga diasingkan ke Tanah Merah Irian. Abdul Muluk seorang propagandis Partai Komunis Indonesia asal Minangkabau, karena ucapan-ucapannya menyerang Pemerintah Hindia Belanda dalam suatu rapat umum di Kutaraja dituntut selama 7 tahun penjara. Minggu berasal dari Jawa, pada mulanya ia sebagai pejabat ketua satu partai komunis Indonesia di Samalanga dan kemudian sebagai pimpinan komunis di Kutaraja, dituntut empat tahun penjara. Muhammad Din yang menjabat Partai Komunis Indonesia di Blang Kejeren dituntut selama 15 tahun penjara.

Pengawasan terhadap gerak-gerik tokoh-tokoh pergerakan baik yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat politik dilakukan oleh Belanda secara ketat. Sehubungan dengan hal ini pihak Belanda di Aceh mulai membentuk apa yang dinamakan *Veld Politie* atau polisi lapangan, penjaga keamanan luar biasa yang dipersenjatai. Kedatangan Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang merupakan salah seorang tokoh Partai Nasional Indonesia dari Jawa ke Aceh, di mana dia juga menemui Teuku Tjihik Muhammad Thayeb *Uleebalang* Peureulak yang pernah menjadi anggota *Volksraad* pertama sebagai wakil yang ditunjuk dari Aceh, cukup mengkhawatirkan pihak Belanda di Aceh. Kegiatan-kegiatan Mr. Iwa Kusuma Sumantri selama di Aceh mendapat sorotan pihak Belanda. Begitu juga gerakan-gerakan yang bersifat keagamaan seperti Muhammadiyah, Sumatra Thawalib dan Ahmadiyah juga menjadi perhatian Belanda. Kunjungan Muhammad Zein Jambek tokoh Muhammadiyah asal Minangkabau ke Tapak Tuan Aceh Selatan dianggap oleh Belanda menimbulkan ketidak tenangan di daerah itu. Khusus terhadap Muhammadiyah karena dikhawatirkan akan ditunggangi oleh unsur-unsur politik, sebagaimana telah disebutkan dilarang membentuk cabang-cabangnya di Kabupaten Aceh Barat yang dianggap rawan oleh Belanda.

Datangnya tokoh-tokoh gerakan Persatuan Muslimin Indonesia (PMI) dari Deli ke Aceh pada tanggal 6 Desember 1932 di bawah

pimpinan Haji Suib El Gutusi dan Mansyur Daud gelar Datuk Panglimo Kayo, keduanya berasal dari Minangkabau, mendapat sambutan hangat dari tokoh-tokoh masyarakat Aceh. Di antara tokoh-tokoh masyarakat ini adalah, Cut Seuman dari Lhok Seumawe, Teuku Tjihik Peureulak, kedua iparnya Teuku Tjihik Peusangan dan Teuku Tjihik Samalanga, Teuku Tjihik Meureudu, Teuku Mahmud Pidie, Teuku Hasan dan Teuku Muhammad Ali. Dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan dan bersemboyan bahwa Islamlah yang menguasai Indonesia, Islam menentang penjajahan dan dengan non kooperasi menuju kemerdekaan Indonesia, menimbulkan berbagai reaksi dari pihak Belanda. Surat-surat kabar berbahasa Belanda seperti *Deli Courant* dan *De Java Bode* yang masing-masing terbit di Medan dan di Batavia (Jakarta), membahas secara khusus aksi-aksi pergerakan Persatuan Muslimin Indonesia (PMI) di Aceh. Belanda menganggap aksi gerakan ini lebih berbahaya dari gerakan-gerakan yang bersifat keagamaan lainnya yang ada di Aceh seperti Muhammadiyah, Ahmadiyah, Sumatra Thawalib dan *Jong Islamietenbond* atau Serikat Pemuda Islam. Karena menurut Belanda di dalam gerakan PMI, selain terdapat unsur-unsur keagamaan dan nasionalisme juga karena ikut sertanya beberapa tokoh *Uleebalang* terkemuka dari Aceh baik hanya sebagai simpatisan maupun sebagai anggota.

Demikian gambaran selintas tentang berbagai organisasi pergerakan nasional dan kiprahnya di daerah Aceh pada permulaan hingga perempatan pertama abad XX.



## BAB IV

### ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL KHAS ACEH

Pergerakan nasional di Aceh ditandai dengan muncul dan berkembangnya berbagai organisasi pergerakan yang datang dari luar Aceh, khususnya dari pulau Jawa dan adanya organisasi pergerakan yang lahir di daerah Aceh sendiri yang juga memiliki wawasan nasional. Adapun organisasi yang lahir dan berkembang di Aceh yang sangat populer ialah, *Atjeh Vereeniging* (Serikat Aceh) dan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Kedua organisasi ini merupakan organisasi pergerakan yang khas Aceh namun tidak dapat dipisahkan dari kerangka pergerakan nasional bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari maksud dan tujuan didirikannya kedua organisasi tersebut, yang sarasannya untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di daerah Aceh. Organisasi yang tersebut pertama (*Atjeh Vereeniging*) merupakan wadah para intelektual Aceh yang berasal dari hasil pendidikan barat dan yang tersebut kedua (PUSA) adalah hasil dari pendidikan keagamaan yang modernis.

Untuk mengetahui bagaimana kiprah kedua organisasi tersebut di atas dalam pencaturan sosial politik dan budaya pada masa pergerakan nasional di daerah Aceh dapat disimak berikut ini :

#### 1. *Atjeh Vereeniging*

Mulai tahun 1914 banyak pemuda Aceh, khususnya anak para bangsawan (*Uleebalang*) yang telah menyelesaikan pendidikannya pada sekolah-sekolah buatan Belanda, baik yang ada di pulau Sumatera khususnya Sumatera Barat maupun yang di pulau Jawa. Setelah kembali ke Aceh mereka pada umumnya mendapat pekerjaan pada kantor-kantor pemerintah Belanda dan adapula yang menjadi *Uleebalang* menggantikan orang tuanya sebagai kepala pemerintahan di daerah kenegerian masing-masing (*Zelfbestuurders*). Dari beberapa alumnus sekolah Belanda yang

berpikiran maju dan memiliki wawasan kebangsaan, menginginkan berdirinya sebuah organisasi moderen. Dengan organisasi ini diharapkan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Aceh sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju atau dengan kata lain ingin memajukan masyarakat Aceh dalam berbagai hal. Untuk persiapan ke arah ini terlebih dahulu diadakan sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para *Uleebalang* baik yang alumnus sekolah Belanda atau yang bukan.

Dalam pertemuan/persidangan untuk mendirikan organisasi tersebut, pada mulanya terdapat perbedaan di antara para *Uleebalang*. Kalangan *Uleebalang* yang bukan hasil didikan Belanda, katakanlah kaum tua yang diwakili oleh Teuku Panglima Polem Muhammad Daud Sri Muda Perkasa agak keberatan dengan beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran dasar organisasi. Sementara para *Uleebalang* yang telah mengenyam pendidikan barat atau “kaum muda” di bawah pimpinan Teuku Chiek Muhammad Thayeb Peureulak dan Nyak Tjut sebagai perancang anggaran dasar organisasi yang akan didirikan itu, tetap mempertahankannya. Namun akhirnya pada tanggal 12 Oktober 1916 berhasil juga dibentuk sebuah organisasi yang dimaksud dengan diberi nama *Atjeh Vereeniging* (Serikat Aceh). Adapun susunan pengurusnya adalah, Teuku Chiek Muhammad Thayeb Peureulak dan Teuku Teungoh Meuraksa sebagai ketua dan wakil ketua, Nyak Tjoet dan Aboe Bakar sebagai sekretaris pertama dan kedua, Teuku Oesin sebagai bendahara, Teuku Chiek Muhammad Johan Alamsyah dan Teuku Asan sebagai komisaris.

Reaksi pemerintah Hindia Belanda terhadap berdirinya *Atjeh Vereeniging* menunjukkan sikap yang positif. Mereka dengan serta merta mendukung organisasi ini disebabkan selain karena diprakarsai oleh para *Uleebalang* hasil didikan Belanda juga dimaksudkan untuk mengekang lajunya perkembangan organisasi Serikat Islam (S.I) yang ditakuti pemerintah Belanda di Aceh.

Adapun tujuan utama organisasi ini adalah untuk merubah adat lama yang mengekang perkembangan masyarakat Aceh dan juga untuk memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk mendapat pendidikan



yang sama dengan kaum pria, serta mengusahakan bea siswa bagi anak-anak yang cerdas untuk di sekolahkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Untuk mengetahui lebih dekat kedudukan dan tujuan sebenarnya organisasi *Atjeh Vereeniging* dapat dilihat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari organisasi ini seperti di bawah ini :

## STATUTEN

Dari

“VEREENIGING ATJEH”

DI KOETA-RADJA

---

### AFDEELING I.

#### ARTIKEL I.

Nama, Lama dan Pangkal Kedoe-  
doekannja

Perserikatan ini dinamai “Atjeh” didirikan lamanya 29 Tahoen terhitoeng moelai pada hari jang statuten ini telah di akoei sah oleh Seri Padoeka Jang Moelia Gouverneur Generaal. Pangkal kedoedoekan vereeniging ini di Koeta-Radja.

#### ART. 2.

Maksoed.

Maksoed vereeniging ini akan memperbaiki :

- a. Pengadjaran : Sekolah dan agama
- b. Adat dan sarat jang memalangi kemadjoean dan sopan santon bagi anak negeri bangsa Atjeh.

### ART. 3.

#### Bagaimana Maksoed diperoleh

- a. Akan mendapat maksoed ialah dengan mendirikan vereeniging.
- b. Menjampaikan permintaan-permintaan dari vereeniging jang patoet atas djalan-djalan jang halal kepada pemerintah-pemerintah jang berkoeasa bila ada perloenja.
- c. Mengadakan soeatoe modal dari pada oewang ijoeran, jang dari padanja dikeloearkan sekalian belandja jang perloe.

### AFDEELING II.

#### ART. 4.

#### Persekoetoean

Perserikatan ini mempoenjai

- a. Gewone leden (leden biasa)
- b. Eere leden (leden kehormatan)
- c. Donateurs (pembantoe)
- d. Adviseurs

#### ART. 5.

Gewone leden jaitoe bangsa Atjeh laki-laki perempoean jang soedah sampai oemoer (akil balig).

#### ART. 6.

Jang diangkat djadi eereleden, jaitoe : sekalian njonja dan toean bangsa apa sadja jang banjak memboeat djasa kepada vereeniging ini.

ART. 7.

Donateurs (pembantoe) ialah siapa sadja jang soedi membantoe dengan memberikan wang sekoerang-koerangnja f 6,- setahoen

ART. 8.

Advesiur, jaitoe orang-orang bangsa Atjeh atau bangsa lain jang didjadikan pembantoe oleh Hoofdbestuur dengan izin perkoempoelan besar (Algemeene vergadering) mereka itoe dipilih dengan menilik ilmoenja jang choesoos.

ART. 9.

Akan mendapat lidmaatschap, patoet diminta kepada afdeelingbestuur; baroe sah ia djadi lid, kalau soedah diperlakoekan oleh Hoofdbestuur.

ART. 10.

Hoofdbestuur berhak akan memetjatkan :

- a. Lid jang ta' membajar contributie dalam 3 boelan.
- b. Lid jang berkelakoean jang ta' patoet.
- c. Lid jang meminta berhenti sendiri.

ART. 11.

Lid jang dipetjatkan menoeroet alinea a dan b (art. 10) boleh membenar dalam Algemeene vergadering.

Lid jang dipetjatkan hilang semoea haknja dalam perserikatan.

Lid jang dipetjatkan menoeroet alinea a dan c (art. 10) boleh diterima mendjadi lid baroe kembali, dengan membajar entree dan ketinggalan oetang contributienja.

Lid jang dipetjatkan sebab menoeroet alinea b (art. 10) boleh diterima kembali dengan menoeroet poetoesan Algemeene vergadering.

### AFDEELING III.

#### Contributie.

#### ART. 12.

Wang contributie (wang ijoeran) jang ditetapkan dalam Huishoudelijk reglement wadjib dibajar dalam tiap-tiap boelan oleh lid-lid :

- a. Orang jang makan gadji dibajar, waktoe terima gadji.
- b. Bagi orang jang ta' bergadji dibajar selambat-lambatnja pada tanggal 10 tiap-tiap boelan.

#### ART. 13.

Contributie dientengkan kepada lid-lid :

- a. Lid ambtenaar Gouvernement jang masoek roemah sakit tiga boelan, membajar 1/2 contributie, sekoerang-koerangnja f 0,25.
- b. Lid ambtenaar Gouvernement jang ontslag membajar serendah-rendah contributie , selama beloem ia mendapat pekerdjaan.
- c. Lid jang lain dari pada ambtenaar Gouvernement apabila mereka itoe menoeroet alinea b atau mendapat ketjelakaan, poen demikian djoega selama beloem bangoen dalam ketjelakaannya itoe.

## AFDEELING IV.

### Hak dan kewajiban lid-lid

#### ART. 14.

Segala lid berhak akan mengoendjoengi persidangan dan boleh menerima sekalian soerak-soerak perserikatan dengan ta' membajar djikalau dikehendakinja. Hanja gewone leden berhak akan menoeroet memilih dan mengoendi merekaitoe dipertjajai benar-benar mengetahoei boenjinja statuten dan isinja huishoudelijk reglement dan wadjiblah menoeroet soerat-soerat peratoeran itoe dengan tertib.

## AFDEELING V.

### Bestuur.

#### ART. 15.

Hoofdbestuur berdiri atas 7 (toedjoeh) orang :

1 (satoe) voorzitter

1 (satoe) onder voorzitter

2 (doea) Secretarissen

1 (satoe) Penningmeester

2 (doea) Commissarissen

Merekaitoe dipilih boeat doea tahoen lamanja dengan menoeroet soera jang terbanjak.

Pekerdjaan Hoofdbestuur diatoer dalam huishoudelijk reglement.

#### ART. 16.

Jang mengoeroeskan pekerdjaan hari-hari jaitoe : Voorzitter, seorang Secretaris dan Penningmeester.

## ART. 17.

Hoofdbestuur menangoeng segala hal vereeniging didalam dan diloear wet (in als buiten rechten).

Hoofdbestuur ta' boleh mendjoeal atau menggadaikan harta kepoenjaan vereeniging djikalau beloem disahkan oleh Algemeene vergadering.

Sekali setahoen diadakan Algemeene vergadering, goena memeriksai sekalian veslag dan oeroesan wang boeat setahoen jang laloe. Bilamana djoeaga segala lid-lid boleh memeriksai oeroesan wang vereeniging.

## ART. 18.

Djebatan-djebatan bestuur jang sekonjong-konjong terboeka akan digenapi dengan lekas dihadapan persidangan (Algemeene vergadering).

## AFDEELING VI.

### Beschermheerschap.

## ART. 19.

Jang diangkat mendjadi beschermheer (toean pelindoeng) seboleh-bolehnja ialah Hoofd van Gewestelijk Bestuur (kepala pemerintah tanah Atjeh).

## AFDEELING VII.

### PENOETOEP

## ART. 20.

Sekalian peratoeran dalam Huishoudelijk reglement dan poetoesan persidangan ta' boleh melanggar Statuten dan senantiasa wadjib ditoeroet dengan tertib.

ART. 21.

Perobahan-perobahan dari Statuten ini hanja boleh berlakoe dengan poetoesan Algemeene vergadering, dan perobahan itoe beloem boleh didjalankan sebeloemnja dikaboelkan oleh Seri Padoeka Jang Dipertoean Besar Gouverneur Generaal.

ART. 22.

Perserikatan ini ta' boleh dipetjahkan (dimatikan) kalau tiada 4/5 bagian dari sekalian ledeng jang bermohon bersama-sama dengan soerat kehadapan Hoofdbestuur.

Apabila perserikatan ini dipetjahkan, maka setelah selesai dari pada membajar segala oetang, maka wang sisanja akan diwakafkan kepada Mesdjid-Raja.

Telah diterima baik dihadapan persidangan pada 17en December 1916.

Hoofdbestuur :

TEUKOE Tji MOHAMMAD THAJEB	Voorzitter
” TEUNGOH	onder idem
NJA' TJOET	Eerste Secretaris
ABOE BAKAR	Tweede idem
TEUKOE OESEN	Penningmeester
” TJHI MOHAMMAD	
” DJOHAN ALAMSJAH	Commissaris
” ASAN I.	idem

KOETA-RADJA, 12 October 1916

Goedgekeurd

De Civ. en Mil. Gouverneur,

H. N. A. SWART.

# HUISHOUDELIJK REGLEMENT

## DARI

“Vereeniging Atjeh”  
di Koeta-Radja.

-----

## AFDEELING I.

Afdeeling-Afdeeling.

### ARTIKEL 1.

Sbolehkan-bolehnya pada tiap-tiap negeri dibangoenkan soeatoe afdeeling; tiap-tiap afdeeling haroeslah mempoenjai leden sekoerang-koerangnja 10 orang.

Djikalaoe perloe maka boleh djoega beberapa negeri didjadikan satoe afdeeling.

### ART. 2.

Tiap-tiap afdeeling dioeroes oleh afdeelingsbestuur menoeroet atoeran jang ditetapkan dalam statuten dan huishoudelijk reglement.

### ART. 3.

Sesoeatoe-atoeran jang didjalankan oleh afdeelingsbestuur haroeslah terlebih dahoeloe dengan izin Hoofdbestuur.

### ART. 4.

Djikalau seorang atau lebih diantara leden dari pada soeatoe afdeeling ada barang keberatan atau pengadoean afdeeling atau Hoofdbestuur maka wadjiblah afdeelingsbestuur memeriksai dan menjampaikan hal ini dengan selekas-lekasnja bersama-sama dengan pendapatannja kepada Hoofdbestuur.



Djikalau pendapatan itoe tidak soetoedjoe dengan pikiran lid jang mengadoe itoe, maka lid jang terseboet boleh menjampaikan hal ini dengan soerat-soerat kepada Hoofdbestuur, tetapi senantiasa wadjiblah dengan setahoe afdeelingsbestuur.

## ART. 5.

Tiap-tiap penghabisan maka wadjiblah afdeelingsbestuur mengirim kepada Hoofdbestuur verslagmenjatakan segala perkara jang telah dioeroeskannya.

## AFDEELING II.

### Maksoed

## ART. 6.

### I. Tentangan pengadjaran.

Akan diberi pertolongan kepada anak-anak leden-saudara kandoeng dari pada leden jang leden itoe djadi voogd-nja- anak saudara kandoeng dari pada leden jang leden itoe mendjadi voogd dari pada anak jang terseboet itoe dan anak penolong atau poen anak bangsa Atjeh jang boekan lid jang dipikir perloe oleh Hoofdbestuur, maka mereka itoe akan mendapat pertolongan :

- a. Jang soedah tammat dengan mendapat keterangan jang bagoes dari Europeesche school dan Hollandsch-Inlandsche school jang bermaksoed pergi meneroeskan peladjarannya kenegeri lain.
- b. Apabila moerid-moerid dari Europeesche school dan Hollandsch-Inlandsche school kematian orang jang menanggoeng oeing sekolahnja maka seboleh-bolehnja vereeniging menolong oeing sekolah anak jang terseboet itoe.

- c. Moerid-moerid jang tammat dari Gouvernements ini, school dan Volksschool maka apabila dipikir perloe oleh Hoofdbestuur maka merekaitoe ditolong dengan belandja sekedar jang perloe sementara ia mendjadi magang dalam soeatoe pekerdjaan.
- d. Kalaoe dirasa perloe oleh Hoofdbestuur maka diberikan djoega pertolongan dengan wang kepada moerid-moerid dari Normaalcursus, Ambachtsschool dan Landbouwschool.

#### ART. 7.

Ditolong oleh vereeniging kepada anak-anak jang akan meneroeskan peladjarannja dalam ilmoe Nahoe, Fikah (Hoekoem) dan Tadjwid (mengadji koeran) pergi ke Mekkah atau Metsir jang mereka itoe telah diakoe sanggoep oleh Commissie jang diangkat oleh vereeniging dan mempoenjai soerat tammat beladjar dalam klas IV volksschool sekoerang-koerangnja dan soedah tammat peladjarannja dalam kitab "Matan-Mihhodj".

#### ART. 8.

Anak-anak jang terseboet dalam artikel 6 dan 7 tiada diberi pertolongan sebeloem ia meneekend contract (perdjandjian) jang bahasa apabila ia telah mendapat pekerdjaan haroeslah ia mendjadi lid vereeniging ini dan membajar kembali wang pertolongan jang telah diterimanja dengan angsoeran 10% dari pada pendapatannja.

#### ART. 9.

### II Tentangan adat

Seboleh-bolehnja adat jang mendatangkan keberatan hendaklah diichtiarkan dengan djalan mentjari peroebahan jang baik atau keentengannja oempama :

#### A. Dalam hal perkawinan :

1. Didjaga (diichtiarkan) soepaja anak laki-laki atau perempoean jang kawin atau (dikawinkan dibawah oemoer 16 tahoen akil balig).
2. Dalam perkawinan seboleh-bolehnja dipakai maksoed jang perloe sadja.  
Ranoeb kong haba, atau ranoeb jang lain-lain, mampleue, dja bisan, peudjamee linto, oeroe 3, 5, 7 dan 9, salen malen, biaja-biaja, peunoewoe, toeng meuteeng beulandja boeleuen, toeng meunaro, peunoelang dan lain-lain sebagainja, maka hal jang terseboet diatas ini haroeslah dihapoeskan; tetapi dengan mengikat perdjandjian antara kedoea belah pihaknja (bisan).
3. Sekalian hal jang akan terdjadi diantara laki-laki dan perempoean jang masoek dalam bahagian adat seboleh-bolehnja dioeroeskan dengan perdjandjian (contract).
4. Doea laki isteri jang telah berkasih-kasihan maka dengan soeka isteri itoe silaki boleh membawa isterinja itoe ke tempatnja.
5. Peungkleh, (peunoelang : romoh dan sebagainja) seboleh-bolehnja djoega dioebah tetapi dengan perdjandjian mereka itoe (contract).

#### B. Dalam hal kematian :

1. Seboleh-bolehnja orang jang kematian tiada mendapat roegi dalam hal adat meuadat oempama : tindeh-mindeh, bri-moembri, toeng-meutoeng, kaphan keureunda dan lain-lainnja.
2. Sekalian kandoeri seboleh-bolehnja djangan diperboeat sebeloem diperboeat jang perloe.
3. Hal poemoe ba'e wadjib dihapoeskan.

C. Dalam hal keramaian dan berkoendjoeng-koendjoengan.

1. "Meukeureudja" dalam hal kawin, soenat rasoel dan menoeroen mandikan anak haroes dihilangkan mengetjoealikan kendoeri dan feest [pesta].
2. Apabila satoe kaoem [familielid] dikoendjoeng atau mengoendjoengi familielidnja seboleh-bolehnya djangan dipakainja adat peue dan berijani : familielid jang datang tiada membawa oewang dan jang koendjoengi djoega tiada memberi oewang.
3. Pemberian seorang kepada seorang tiada boleh dipoelangkan; dari pada ketika itoe poenta' boleh diganti, baik dalam hal kerdja hidoep atau kerdja mati.

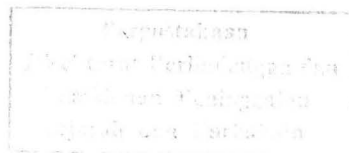
ART. 10.

Djalan akan mendapat maksoed dalam artikel 9, maka wadjiblah Hoofdbestuur meminta kepada afdeelingsbestuur mendjalankan soeatoe peroebahan menoeroet pendapatan Hoofdbestuur, atau Afdeelingstuur, meminta izin kepada Hoofdbestuur akan mendjalankan soeatoe peroebahan menoeroet pendapatan Afdeelingsbestuur itoe. Maka sekalian hal jang akan didjalankan baiklah dengan setahoe kepala pemerintah.

ART. 11.

III. Tentangan jang lain-lain.

Hendaklah mengadakan perkoempoelan perempoean jang maksoednja mengoebahi segala hal ihwal dalam roemah tangga. Oempama : kebersihan, kesihatan, kesopanan, akan menghilangkan pekerdjaan madeueng dan lain-lainja.



## ART. 12.

Kalau perloe boleh perkoempoelan mentjari seorang Njonja Europa akan mendjadi penoentoen atau leider merekaitoe dengan pemilihan Hoofdbestuur akan menjampaikan maksoed jang terseboet dalam artikel 11.

Merekaitoe boleh memperboeat atoeran [reglement] jang boleh dipakainja bila telah disahkan oleh Hoofdbestuur.

## AFDEELING III.

### Hoofdbestuur.

## ART. 13.

President dari Hoofdbestuur mengepalai sambil mengoeroeskan persidangan-persidangan dan mendjaga soepaja persidangan-persidangan diadakan dengan patoet dan soepaja dalam persidangan-persidangan itoe tidak dibitjarakan hal ihwal jang melangkah maksoed perserikatan ini. Ini mendjadi pemimpin perserikatan dan membitjarakan segala perkara atas nama dari lain-lain pendjabat bestuur.

Order voorzitter membantoe voorzitter dalam satoe-satoe perkara dan mengganti voorzitter itoe, djikalau ia sakit atau ada lain halangan.

## ART. 14.

Eerste Secretaris menangoeng sekalian pekerdjaan menjoerat. Ia mendjaga soepaja daftar sekalian leden dan notulen boek dioeroes dengan sepertinja dan soepaja dihadapan persidangan terdapat sekalian soerat-soerat jang diperloei. Ia menoelis sekalian warta jang di chabarkan kepada sekalian afdeeling.

Tweede Secretaris membantoe Eerste Secretaris dalam pekerdjaannja dan mengganti dia bila sakit atau ada halangan jang lain.

#### ART. 15.

Penningmeester menangoeng sekalian oeroesan wang dan wadajib menjatakan penangoengannja dihadapan persidangan bestuur jang nanti diadakan 3 boelan sekali.

#### ART. 16.

Commissarissen mendjaga keamanan perserikatan dan membantoe pendjabat-pendjabat bestuur bila mana mereka itoe meminta bantoean.

#### ART. 17.

Seorang lid Hoofdbestuur boleh diperhentikan (geschorst) atau dilepas. djikalau dipinta 2/3 lid fari bestuur itoe.

Djika seorang lid jang terseboet diperhentikan maka dengan segera patoet dichabarkan kepadanja dengan dinjatakan segala sebab-sebabnja. Ditjaboet schorsingnja atau teroes dilepas sementara mananti kepoatoesan algemeene vergadering.

#### ART. 18.

Djikalau ada perkara jang penting jang ta' dapat dipoatoeskan oleh Hoofdbestuur maka wadjiblah diadakan algemeene vergaring jang biasa.

Sekali dalam setahoen jaitoe pada boelan Poeasa wadjiblah diadakan algemeene vergaring; maka wadjiblah segala perkara jang beloem selesai diperiksa, dibitjarakan.

## ART. 19.

Persidangan-persidangan bestuur boleh menetapkan poetoesan jang halal, djikalau dihadapan persidangan-persidangan itoe hadir sekoerang-koerangnja  $\frac{2}{3}$  bahagian pendjabat bestuur.

## AFDEELING IV.

Wang masoek (Contributie).

## ART. 20

Seorang lid membajar entree f 10,-.

Pembayaran itoe boleh dengan ampat kali angsoeran; dan contributie :

- a. Orang jang bergadji membajar 2 % dari pada gadji berserta toelagenja sekoerang-koerangnja f 0,25.
- b. Orang jang ta' bergadji seberapa jang ditetapkan oleh bestuur dari afdeeling sekoerang-koerangnja f 0,25

Soepaja boleh mereka itoe memberi soera dalam algemeene vergadering djanganlah lid beroetang contributie.

Djika seorang masoek dalam boelan jang berdjalan maka terhitoeng ia soedah mendjadi lid dari tanggal 1 boelan itoe.

## ART. 21.

Sekalian leden jang makan gadji haroes memberi koeasa kepada vereeniging soepaja moedah menagih contributienja.

## AFDEELING V.

### Oeroesan Wang

#### ART. 22.

Hoofdbestuur boleh menjimpan wang goena belandja hari-hari sebesar-besarnja f 50.- lain dari pada itoe ada reservekas sebesar-besarnja f 500.- jang disimpan di Bank “Nederlandsche Handel Maatschappij” di atas girorekening.

#### ART. 23.

Djikalau ada pada Hoofdbestuur wang lebih dari pada jang telah ditetapkan dalam art. 22, maka Hoofdbestuur wadjib memasoekkan kelebihan itoe dalam soeatoe poatoesannja atas nama dari perserikatan “Atjeh”.

#### ART. 24.

Wang yang disimpan dalam Bank atau bahagian dari pada itoe hanja boleh dikeloearkan atas permintaanja Hoofdbestuur, artinja dengan soerat jang ditanda tangani oleh sekalian leden Hoofdbestuur.

#### ART. 25.

Wang simpanan itoe moesti ditangoeng ta' boleh hilang karena kebakaran, pentjoerian atau lain-lain.



## ART. 26.

Djikalau sekonjong-konjong afdeelingsbestuur hendak memakai wang jang perloe maka wadjiblah hal ini disampaikan lekas kepada Hoofdbestuur.

## ART. 27.

Segala belandja goena perserikatan haroes dikeloearkan dari wang kas perserikatan.

## ART. 28.

Sekalian wang jang diterima dan jang dikeloearkan oleh afdeelingsbestuur wadjib dinjatakan dalam salinan kasboek hang haroes dikirim pada tiap-tiap permoelaan boelan kepada Hoofdbestuur.

## AFDEELING VI

### Persidangan

## ART. 29.

Sekali setahoen diadakan persidangan oemoem goena memeriksai sekalian verslag.

Dihadapan persidangan itoe akan diperiksai lagi sekalian oeroesan wang boeat setahoen jang laloe.

## ART. 30.

Sekali dalam 3 boelan diadakan persidangan Hoofdbestuur goena memeriksai oeroesan wang serta membitjarakan sekalian hal ihwal jang telah terdjadi selama 3 boelan jang telah laloe dan jang lain-lain jang perloe jang dapat dibitjarakan.

## ART. 31.

Lain dari pada persidangan-persidangan jang terseboet dalam art. 29 dan 30 maka djikalau perloe boleh lagi diadakan persidangan tambahan.

## AFDEELING VII.

Penoetoep.

## ART. 32.

Masing-masing lid menerima Statuten dan Huishoudelijk Reglement dengan pembajaran f .....

## ART. 33.

Segala perkara jang perloe jang tiada dibitjarakan dalam Statuten dan Huishoudelijk Reglement wadjib dioeroes oleh bestuur menoeroet pikirannja sendiri, sehingga hal itoe dioeroes betoel dihadapan persidangan biasa jang nanti diadakan.

Telah ditetapkan dihadapan persidangan pada 17 December 1916.

TEUKOE TJI MOHAMMAD THAJEB	Voorzitter
” TEUNGOH	onder idem
NJA' TJOET	Eerste Secretaris
ABOE BAKAR	Tweede idem
TEUKOE OESEN	Penningmeester
” THJI MOHAMMAD	
DJOHAN ALAMSJAH	Commissaris
TEUKOE ASAN I.	idem

KOETA-RADJA, 12 OCTOBER 1916

Goedgekeurd

De Civ. en Mil. Gouverneur,

H. N. A. SWART.

Dari statuta yang telah dipaparkan di atas jelas terlihat, bahwa organisasi *Atjeh Vereeniging* merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional yang khas Aceh namun bernuansa nasional.

## 2. PUSA

Organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) lahir dari hasil keputusan musyawarah ulama seluruh Aceh yang diadakan pada tanggal 5 s/d 8 Mei 1939, bertepatan dengan hari peringatan lahirnya (maulid)Nabi Muhammad S.A.W tanggal 12 Rabi'ul Awal 1358 H, di

Kampus Madrasah Al-Muslim Peusangan, Matang Glumpang Dua (*Onderafdeeling* Bireun, Aceh Utara). Sebagai pengambil inisiatifnya ialah : Teungku Abd. Rahman Meunasah Meucap dan Teungku Ismail Yacob dengan mendapat restu dan perlindungan dari Teuku Chiek Muhammad Johan Alamsyah, *Uleebalang* Peusangan. Adapun pengurus pertama yang berhasil disusun pada waktu itu, terdiri dari Tgk. M. Daud Beureueh dan Tgk. Abd. Rahman Meunasah Meucap sebagai ketua dan wakil ketua, Setia Usaha (Sekretaris) I dan II : Tgk. M. Nur El-Ibrahimi dan Tgk. Ismail Yakob, Bendahara T. M. Amin dan Komisaris-komisaris ialah : Tgk. Abd. Wahab Keunalo-Seulimun, Tgk. Syekh Abd. Hamid Samalanga, Tgk. Usman Lampoh Awe, Tgk. Yahya Peudada, Tgk. Mahmud Simpang Ulim, Tgk. Ahmad Damhuri Takengon, Tgk. M. Daud, Tgk Usman Azis. Berhubung ketua I bertugas di Sigli pada Madrasah Sa'adah Abadiyah Blang Paseh, maka untuk sementara waktu, ditetapkan pengurus PUSA berkedudukan di Sigli.

Dalam rangka pembentukan cabang-cabang di daerah, pengurus pusat telah memberi mandat, antara lain, kepada Tgk. Abd. Wahab Keunalo Seulimun untuk daerah Aceh Besar, Tgk. Nyak Cut dan Tgk. Syekh Berahim, Aceh Barat, Tgk. Zamzamy, Aceh Selatan, Tgk. Ismuha dan Tgk. Ismail Yacob, Aceh Utara dan Tgk. M. Amir Husin Al Mujahid untuk Aceh Timur. Tanpa menghadapi rintangan yang berarti, para pemegang mandat ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

PUSA merupakan sebuah organisasi kedaerahan yang dalam berbagai gerakannya tampak watak Aceh yang khas. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila organisasi ini dalam waktu yang relatif singkat sudah meluas ke seluruh daerah Aceh dan menjadi milik masyarakat. Apabila Tgk. Muhammad Daud Beureueh atau pengurus PUSA lainnya mengadakan perjalanan keliling untuk propaganda sampai ke daerah pesisir Barat Aceh selalu mendapat sambutan yang meriah. Hanya di beberapa tempat saja, yaitu dalam beberapa wilayah di pesisir Selatan-mungkin karena corak Minagkabau - Tapanulinya kuat di sini - gerakan PUSA tidak banyak memperoleh pengikutnya. Di samping itu sebagian besar para *Uleebalang*, pada awal pendirian PUSA di daerahnya; bahkan Tuanku Mahmud, yang begitu besar simpatinya kepada gerakan ini, telah

diangkat menjadi pelindung PUSA seluruh Aceh. Tampaknya dengan lahirnya PUSA, pergerakan nasional di Aceh telah menemukan bentuknya sendiri, dalam pengertian sebagian besar pemimpin pergerakan di daerah ini telah berhasil dipersatukan - dalam organisasi tersebut - untuk kesatuan gerakannya.

Adapun maksud dan tujuan dari gerakan PUSA, seperti tercantum dalam anggaran dasarnya, adalah :

- a. Oentoek menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan Syiar Agama Islam.
- b. Menjatoekan paham pada penerangan Hoekoem.
- c. Memperbaiki dan menjatoekan leerplan-leerplan Pelajaran Agama di sekolah-sekolah Agama.
- d. Mengoesahkan oentoek mendirikan Perguruan Islam dan mendidik pemoeda-pemoeda serta poetri-poetri Islam dalam keagamaan.

Kalau diperhatikan dari apa yang tertulis itu, tampaknya PUSA tidak bergerak dalam bidang politik. Tetapi ternyata dalam praktek, yang secara samar-samar mulai kelihatan sejak kongres pertama tahun 1940, keadaannya akan berlainan sama sekali. Benih-benih permusuhan terhadap Belanda sungguh-sungguh ditanamkan, terutama kepada pemuda melalui organisasi kepanduannya, *Kasyafatul Islam (KI)*, sehingga pada gilirannya kelak gerakan ini telah menjadikan dirinya sebagai wujud gerakan anti pemerintah Belanda yang cukup membahayakannya.

Untuk mencapai tujuannya, sebagai langkah pertama, sebuah sekolah guru yang bernama; Normal Islam Institut Bireun, dibuka pada tanggal 27 Desember 1939. Sebagai pimpinannya ditunjuk M. Nur Al Ibrahimy, lulusan Al-Azhar University dan Darul'ulum Mesir, sedang wakilnya ialah : Teuku Muhammad, bekas siswa R. H. S. (Rechts Hoge School) di Jakarta. Jumlah siswa tahun pertama sebanyak 57 orang, terdiri dari 55 putera Aceh, seorang putera Minangkabau dan seorang dari Palembang.

Pada tanggal 20 s/d 24 April 1940 PUSA mengadakan kongresnya yang pertama di Kuta Blang Asan Sigli. Dalam kongres ini kelihatan kekuatan PUSA yang mengejutkan. Walaupun umurnya masih sangat singkat (satu tahun). Berbagai kekuatan dalam masyarakat, kelompok ulama fanatik atau yang maju, kelompok pemuda konservatif atau yang beraliran nasionalistis, modern, para *uleebalang* yang anti Belanda bersatu dalam wadah ini dan menyalurkan aspirasinya di sana. Semua cabang di daerah mengirinkan wakilnya dan turut juga diundang peserta tamu dari luar, yaitu : Mahmud Yunus dari Padang dan Encik Rahman El Junusiyah dari Padang Panjang. Tampaknya pemerintah Belanda waktu itu tidak cukup mempunyai kekuatan untuk membendung atau membubarkan kongres tersebut, walaupun ada pembicara yang diturunkan dari podium, karena kritik tajam terhadap politik pemerintah.

Sebagai hasil kongres telah diambil beberapa keputusan, a.l. yang penting, ialah :

- a. Pembentukan pemuda PUSA dan Muslimat PUSA, masing-masing dipimpin oleh Amir Husin Al Mujahid dan Tgk. Nyak Asna Daud Beureueh (istri Tgk. Mohd. Daud Beureueh).
- b. Untuk menetapkan hukum yang menyangkut dengan berbagai masalah agama dan mengawasi PUSA agar selalu dalam gerakannya sejalan dengan ketentuan agama dibentuk pula Majelis Taufiziah Syariyah PUSA di bawah pimpinan Tgk. H. Hasballah Indrapuri.
- c. Pembentukan bagian Penyiaran dan Penerbitan PUSA dengan tugas utama menerbitkan majalah resmi PUSA.

Tugas pertama bagian Pemuda adalah mengorganisir gerakan kepanduan, yang diberi nama : KASYAFATUL ISLAM (KI). Dengan demikian kegiatan pemuda menjadi terkoordinir dan kekuatannya semakin tampak dalam masyarakat. Kwartir Induk KI. ini ditempatkan di Idi, tempat tinggal Amir Husin Al Mujahid dan kwartir-cabang dalam waktu singkat telah berhasil dibentuk di daerah-daerah, sehingga pada waktu pengangkatan T. Panglima Polem M. Ali menjadi Panglima *Sagi XXII* Mukim, KI ikut ambil bagian sebagai pengawal kehormatan. Sedang pada kongres Pemuda dan Muslimat PUSA di Langsa tahun 1941

KI berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai penjaga keamanan selama berlangsungnya kongres, apalagi suasana kongres cukup panas, karena para pemuda dengan bersemangat telah berani memperlihatkan sikap anti pemerintah Belanda, terutama dalam sidang-sidang tertutup suasana ini nampak sekali.

Sementara ini bagian Penyiaran dan Penerbitan berhasil pula menerbitkan majalah “Penyoeloeh” di bawah pimpinan Tgk. Ismail Yakob. Majalah ini diterbitkan di Bireun dan dicetak di Medan. Dan untuk lebih mensejajarkan geraknya dengan organisasi-organisasi Islam di luar daerah pada akhir tahun 1940 PUSA juga telah menjadi anggota M.I.A.I. (Majlis Islam A’la Indonesia).

Menjelang akhir kekuasaan Belanda, PUSA, melalui utusannya Tgk. Syekh Abd. Hamid Samalanga, mengadakan hubungan rahasia dengan Jepang di Penang. Setelah Jepang berkuasa, para pemimpin PUSA menjadi musuh Jepang yang ditakutinya, sehingga banyak di antara mereka yang ditangkap, seperti Tgk. Mohd. Daud Beureueh, Tgk. Abdul Wahab Seulimum, Amir Husil Al Mujahid, Tgk. M. Yunus Jamil dan lain-lain. Peranan PUSA semakin menentukan nanti dalam mempertahankan kemerdekaan selama revolusi fisik (1945-1950). Pada waktu itu sebagian besar para pejabat pemerintahan, pemimpin/pergerakan masyarakat sampai pada tingkat yang paling bawah, anggota-anggota lasykar rakyat (Mujahidin, Pesindo dan lain-lain) terdiri dari bekas pemimpin serta anggota PUSA atau organisasi bawahannya (*Kasyafatul Islam* dan lain-lain) di masa yang lalu.

## BAB V

### PENUTUP

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab di atas, terlihat bahwa di daerah-daerah Aceh pada awal abad XX telah muncul sekelompok cendekiawan hasil didikan Belanda. Pendidikan Barat yang diprioritaskan Belanda kepada para anak bangsawan Aceh (*Uleebalang*) tidak memberi keuntungan dalam arti yang sesungguhnya bagi penguatan kekuasaan Belanda di Aceh seperti yang mereka harapkan. Oleh karena sebagian kaum cendekiawan ini masih berani menentang pelbagai kebijaksanaan pemerintah Belanda yang dianggap merugikan rakyat Aceh.

Derap langkah pergerakan nasional yang bermula di pulau Jawa, pada perempatan pertama abad XX telah bergema pula di daerah Aceh. Meskipun pada waktu yang bersamaan desingan peluru dalam arti pelawanan-perlawanan secara fisik masih terdapat di seantero daerah Aceh, tetapi juga bermunculan organisasi-organisasi moderen, seperti Serikat Islam (Juli 1916), Serikat Aceh Muda (Juli 1916), Serikat Aceh (1916), Boedi Oetomo (Januari 1918), Volkronderwijsbond Aceh (Desember 1918), Islam menjadi Satu (1919), Insulinde (Pebruari 1919), Kongsi Atjeh Sumatra (Juli 1920), Muhammadiyah (1927), Al-Muslim (1929), Pusaka (1929), JIB (1930), Taman Siswa (1932), Parindra (1939), PUSA (1939), serta pelbagai organisasi serikat kerja dari kepanduan.

Organisasi-organisasi pergerakan seperti yang disebutkan di atas, oleh para cendekiawan Aceh pada umumnya dijadikan sebagai wadah kegiatan politik mereka. Melalui organisasi inilah (sekalipun bukan sebagai partai politik) rakyat Aceh melalui para intelektualnya menyalurkan aspirasi politiknya. Mereka melampiaskan keinginan politik dengan cara lebih menonjolkan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya bersifat sosial. Bahkan sekolah-sekolah agamapun tidak jarang dijadikan sebagai tempat propaganda anti Belanda. Keadaan seperti ini (menggunakan organisasi sosial sebagai wadah kegiatan politik) semakin



nampak jelas setelah tahun 1927, yaitu sejak Syarikat Islam (SI) tidak diizinkan melakukan kegiatannya di Aceh.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, juga terlihat bahwa di daerah Aceh pada waktu itu ada dua kelompok pemimpin yang telah berperan aktif dalam menumbuhkan pergerakan nasionalisme di Aceh. Pertama kaum bangsawan atau para pemerintahan adat dan kedua, karena ulama yang pada umumnya dari kalangan ulama modernis. Meskipun para pemimpin adat atau bangsawan tidak semuanya telah berperan aktif di balik layar untuk memperkarsai atau membina pertumbuhan pelbagai organisasi pergerakan, tetapi pada umumnya mereka (yang pernah mengecap pendidikan moderen) sedikit banyak ikut mendukung aktifitas dari pada organisasi tersebut, khususnya di daerah kekuasaannya (pelaku pemimpin adat). Di samping itu para ulama khususnya hasil didikan madrasah (kaum terpelajar) telah ikut serta pula dalam membangkitkan kesadaran berbangsa pada rakyat Aceh.

Selain itu juga jelas kepada kita bahwa pemerintah Hindia Belanda di Aceh tidak seluruhnya mampu menggunakan kaum bangsawan Aceh masuk dalam orbit mereka. Dengan kata lain, kaum bangsawan ini tidak mudah mereka rangkul meskipun telah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan moderen atau didikan Barat. Ternyata juga pendidikan moderen yang pada mulanya difasilitasi Belanda kepada para *Uleebalang* (pendidikan yang beda dengan pendidikan untuk kalangan rakyat biasa) tidak memberi keuntungan dalam arti yang sesungguhnya bagi kelangsungan/penguatan kekuasaan Belanda di Aceh. Sikap menentang kekuasaan penjajah, rupa-rupanya tidak pernah padam pada diri sebagian mereka. Bahkan justru kemampuan intelektual yang mereka miliki sebagai hasil dari pendidikan moderen, telah digunakan sebagai alat efektif untuk membangkitkan semangat kemerdekaan pada rakyat Aceh. Jadi, dapat dikatakan pendidikan Barat yang diperkenalkan Belanda kepada rakyat Aceh sebagai “senjata makan tuan”.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Sumber-Sumber Arsip

Kern, R. A. Collectie, No. H. 797., *Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land-, Volkenkunde* (KITLV) Leiden.

Mail Rapporten, 1901-1940, Kementrian Dalam Negeri Belanda, Den Haag. Di antaranya, mengenai "Laporan Tentang Keadaan Politik Dalam Gubernemen Aceh dan Takluknya", *mailr.* No. 899x/26 (selama pertengahan pertama tahun 1926). No. 1142x/27 (selama pertengahan pertama tahun 1927) No. 221x/28 (selama tahun 1927) No. 835x/28; No. 130x/29. No. 856x/29; No. 143x/29; No. 667x/33 dan No. 374 *geh./34* (laporan mengenai politik polisionil). "Memori Serah Terima Jabatan", *mailr.*, No. 1624x/32. No. 504 *geh./36*; No. 2398/18. "Masalah Pembunuhan Aceh". *mairl.* No. 918 *geh./33*. No. 828 *geh./33*, No. 8/3 *geh./33* dan No. 240 *geh./34*.

### 2. Sumber-sumber resmi yang telah diterbitkan

*Algemene Verslag Van Het Onderwijs in Nederlandsch-Indië Over het School-Jaar 1933 - 1934.*

*Handelingen Volksraad, 1927 - 1942.*

*Koloniale Verslagen, 1900 - 1913.*

*Regerings Almanak Voor Nederlandsch-Indië, 1939 - 1942.*

### 3. Majalah dan Surat Kabar

*Atjeh*, "Publicatie", No. 23, 1937.

*Atjeh Simbun*, Th. IV, 15-11-2605

*Bintang Timoer*, Th. 1929 - 1930.

*De Deli Courant*, 1932 - 1934.

De Java Bode, 1932 - 1933.

De Telegraaf, 1939.

*Pedoman Masyarakat*, No. 30, 39, 40, Th. II, 1936.

*Sinar Atjeh*, Koetaradja, 1908.

4. Buku-Buku dan Artikel.

“Atjeh”, *Encyclopedie Van Nederlandsch-Indië (ENI)*, Jilid I & VIII,  
Leiden : E. J. Brill, 1917 & 1939.

Boland, B. J. *The Struggle Of Islam in Modern Indonesia*, The  
Hague : Martinus Nijhoff, 1971.

Brugmans, I. J. *Geschiedenis Van het Onderwijs in Nederlandsch-  
Indië* 1938.

C. L., “School en Huwelijk op Atjeh”, *TBB*, 1915.

Doup, A. *Korps Merechaussee Atjeh*, 1890-1940. (Medan : N. V.  
Deli Courant, 1940).

Gobee, E. dan C. Adriaanse, *Ambtelijke Adviezen Van C. Snouck  
Hungronje* 1899 - 1936, jilid I, 1957.

Gonggrijp, J.R.C. *Overzicht van de Economische Ontwikkeling Van  
Atjeh sedert de Pasificatie* (Tijdperk 1923-1938), 1944.

Ibrahim Alfian, T. “Modern Education in Aceh, A. Preliminary  
Note”, *Sixth International Conference on Asian History*, TAHA,  
Yogyakarta 1974.

Insider, *Atjeh Sepintas Lalu*, Djakarta : Fa. Archapada, 1950.

Ismuha, "Sejarah Perkembangan Pendidikan Agama di Aceh",  
*Prasaran Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam  
di Aceh*. Banda Aceh : MUI, Aceh, 1978.

Jongejans, J. *Land en Volk Van Atjeh, Vroeger en Nu*. Baarn :  
Hollandia Drukkerij, 1936.

Kreemer, J. *Atjeh*, Leiden : E. J. Brill, 1922.

*Kumpulan Pidato Anggota-anggota "Volksraad" Teuku Chiek  
Muhammad Thayeb, Teuku Nyak Arief, Tuanku Mahmud*. Banda  
Aceh : PDIA, 1978.

*Menyambut Konperensi Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa  
Atjeh ke 26*, Kutaradja : Panitia Konperensi Muhammadiyah  
Daerah Istimewa Atjeh ke 26, 1962.

Muhammad Said, *Atjeh Sepandjang Abad*. Medan : Pengarang  
Sendiri, 1961.

Piekaar A. J. *Atjeh en de Oorlog Met Japan*. Den Haag, Bandung:  
W. Van Hoeve, 1949.

Pluvier, Jan, *Indonesië : Kolonialism Onafhankelijkheid Neo-  
kolonialisme*, 1978.

Pringgodigdo, A.K. *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*. Djakarta:  
Dian Rakjat, 1970.

Safwan, Mardanas, *Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arief*. Jakarta :  
Proyek Biografi Pahlawan Nasional, Dep. P dan K, 1975.

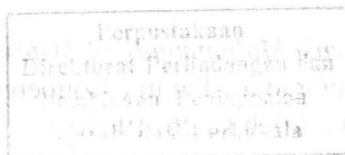
Siegel, James T. *The Rope Of God*. Berkeley : University Of  
California Press, 1969.

Snouck Hurgronje, C. *De Atjehers II*, Leiden : E.J. Brill, 1894.

Sartono Kartodirjo (ed), *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid VI. Jakarta: Departemen P dan K, 1975.

Wal, S.L van der, *De Volksraad en de Staatkundige Ontwikkeling van Nederlandsch-Indië*, 1964.

-----, (ed), *Het Onderwijsbeleid in Nederlandsch - Indië*, 1963.





PERP  
95  
Ditlin